

*Artikel mengenai Kunjungan ke Hanoi, Vietnam: Hal 18*  
*Editorial: Kenyataan di balik Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA)*  
*dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, Hal 20*

## Tinjauan Mengenai Program RESPECT di Timor Lorosae

**R**ecovery, Employment and Stability Program for Ex-combatants and Communities in Timor Lorosae (RESPECT) adalah salah satu program pembangunan yang menurut teori, administrasinya dijalankan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* yang telah berjalan selama setahun di Timor Lorosae. Program ini didanai oleh Pemerintah Jepang melalui UNDP. Dalam pelaksanaannya UNDP melibatkan Pemerintah sebagai mitra dalam pengambilan kebijakan-kebijakan

Persoalan CEP yang dimaksud, misalnya ketegangan antara struktur-struktur pembuatan keputusan CEP dan struktur-struktur kepemimpinan lokal, terutama di tingkat kecamatan dan desa, karena masyarakat tidak merasa memiliki struktur CEP serta model struktur CEP yang kurang sensitif terhadap struktur pemerintahan lokal. CEP memaksakan struktur yang dirancangnya sendiri dan kurang memperkuat struktur lokal yang telah ada. Selain itu, pemilihan dewan-dewan atau pengurus CEP dianggap tidak demokratis dan tidak representatif, kurangnya wakil perempuan dan kurangnya komunikasi dan sosialisasi program yang jelas dari pihak pengurus CEP kepada struktur kepemimpinan desa dan kecamatan serta kepada masyarakat.

umum di tingkat nasional maupun distrik, misalnya tentang apakah sebuah proyek sesuai dengan perencanaan nasional atau tidak. Sedangkan perihal kebijakan pengalokasian dana dalam pengimplementasian program berada di bawah kontrol UNDP.

Tujuan RESPECT adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat rentan, seperti *Ex-Combatentes*, para janda, kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan dan lainnya. Tujuan lain dari program itu adalah untuk mendukung penyatuan kembali (*reintegrasi*) dan turut berpartisipasi kembali dalam aspek sosial-ekonomi di era kemerdekaan ini melalui aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Secara resmi Pemerintah Jepang dan UNDP menandatangani sebuah kesepakatan pendanaan program RESPECT pada 25 Maret 2003. Selanjutnya April 2003 Pemerintah

*(bersambung ke hal 2)*



### Daftar Isi . . .

|  |    |
|--|----|
| Tinjauan Mengenai Program RESPECT di Timor Lorosae |    |
| Timor Lorosae ?.....                               | 1  |
| Berita Singkat.....                                | 9  |
| La'o Hamutuk Butuh Staf Baru.....                  | 11 |
| Dominasi Pertamina Serta                           |    |
| Implikasinya Terhadap EDTL.....                    | 12 |

Jepang mencairkan dana sebesar US\$4 juta kepada UNDP. Kemudian 26 Juni UNDP dan Pemerintah RDTL secara resmi menandatangani dokumen proyek RESPECT dalam hal dimulainya pendanaan aktivitas dan program RESPECT untuk jangka waktu dua tahun.

Informasi dari Kantor Unit RESPECT-UNDP di Timor Lorosae menjelaskan bahwa ide seputar program ini telah dimunculkan pada Agustus 2002, dimana Pemerintah Timor Lorosae mengundang negara-negara donor untuk mendiskusikan mengenai bantuan kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk *Ex-combatentes*. Selanjutnya UNDP yang merancang program ini, dan kemudian mempresentasikan kepada Pemerintah TL pada Januari 2003. Menurut informasi dari UNDP, rancangan program ini didasarkan pada hasil analisa kondisi nyata di Timor Lorosae yang menunjukkan kurangnya lapangan kerja yang berakibat pada rendahnya tingkat penghasilan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Rancangan program ini diharapkan akan menjawab persoalan lapangan kerja.

Pada tahun 2003, La'o Hamutuk bekerjasama dengan Departemen Keuangan RDTL mengadakan penelitian tentang CEP (Community Empowerment Program) dan hasilnya menunjukkan beberapa persoalan, terutama menyangkut pembentukan model struktur CEP. Bank Dunia sebagai pendukung utama CEP mengakui bahwa model struktur CEP telah menciptakan persoalan di komunitas, terutama dengan struktur kepemimpinan lokal (*lihat Laporan Penilaian Independen pada website La'o Hamutuk*).

Pada tahun ini La'o Hamutuk mengadakan monitoring selama tiga bulan. Fakta mengindikasikan bahwa ada kesamaan antara program CEP dengan RESPECT.

Pihak pengelola RESPECT menjelaskan bahwa sebelum RESPECT dibentuk, tim RESPECT telah banyak belajar dari proyek CEP yang dijalankan oleh Bank Dunia di Timor Lorosae yang terbukti penuh dengan banyak persoalan (*lihat Bulletin La'o Hamutuk, Vol. 3, No. 7*). Berdasarkan pengalaman dari CEP, pihak RESPECT bertekad untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, demokrasi, pertanggungjawaban dan kesetaraan partisipasi laki-laki dan perempuan di dalam programnya di seluruh distrik yang menjadi target RESPECT. Meskipun banyak kalangan setuju dengan prinsip dan tujuan dari RESPECT adalah positif, akan tetapi banyak masyarakat Timor Lorosae meragukan apakah rancangan RESPECT yang dimotori oleh UNDP dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dan tujuan tersebut yang telah didukung oleh Pemerintah RDTL. Apakah UNDP sebagai suatu lembaga PBB yang besar dan internasional dengan struktur pengambilan keputusan yang sangat birokratis dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ideal tersebut. Selain itu juga akan melihat proses pengimplementasian RESPECT berkaitan

dengan prinsip transparansi, pertanggungjawaban dan partisipasi yang berbasiskan kesetaraan gender.

Selama tiga bulan, La'o Hamutuk mengumpulkan informasi mengenai RESPECT di distrik Dili, Manatuto, Liquisa, Ermera, Aileu dan Bobonaro serta dari Kantor Unit RESPECT UNDP, Kantor SRSG Mr. Sukehiro Hasegawa dan Kantor Kementerian terkait di Dili.

### **Pendanaan dan Alokasi Dana**

Selama tahun pertama (Mei 2003-April 2004) pengeluaran dana telah mencapai \$ 1.095.550,00 Dolar Amerika. Pada tahun kedua, pihaknya diperkirakan akan menghabiskan \$2.878.809,00 Dolar Amerika. Semua dana ini dibutuhkan untuk membiayai proyek berskala nasional maupun distrik serta pembiayaan manajemen pengoperasian. Hingga sekarang (September 2004), informasi yang terhimpun mengindikasikan bahwa total dana yang digunakan untuk proyek setingkat distrik sebesar \$ 1.074.852,02 Dolar Amerika. Sementara untuk Proyek di tingkat nasional adalah \$338.832,00 Dolar Amerika.

Pihak RESPECT juga memperkirakan bahwa program ini akan membutuhkan dana lebih banyak lagi untuk kelanjutannya, sehingga pihaknya kini berupaya untuk meminta tambahan dana dari sumber lain yang ingin membantu. Upaya pencarian dana tersebut terealisasi dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Thailand sebesar \$213.000 Dolar Amerika yang diberikan kepada Program RESPECT pada 24 September 2004. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan monumen nasional di Metinaro bagi para korban perang. Walaupun pihak UNDP terus mencari dana untuk Program RESPECT serta terlibat langsung dalam pengimplementasian program, namun pada saat yang sama pihak UNDP juga selalu menegaskan bahwa RESPECT merupakan program orang Timor Lorosae yang perlu didukung dan dilanjutkan.

Banyak orang Timor Lorosae termasuk dari kalangan pemerintahan berpendapat bahwa sejauh ini telah ada indikasi akan bahaya ketidaksuksesan RESPECT dan justeru akan lebih menambah kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dr Estanislau da Silva menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung Program RESPECT karena tujuannya sangat positif, namun dalam pelaksanaannya hingga kini banyak hal yang harus segera diperbaiki termasuk pengaturan dana yang efektif oleh pihak RESPECT-UNDP. Pada kesempatan lain, melalui diskusi-diskusi informal dengan pemimpin di sub-distrik dan desa, dari beberapa distrik seperti: Aileu, Ainaro, Manatuto, Liquica, Dili, Maliana dan Ermera yang kami temui, pada umumnya mereka tidak merasa memiliki RESPECT karena mereka kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

**Temuan-temuan kami menunjukkan keprihatinan serius akan Program RESPECT, seperti minimnya proses sosialisasi dan komunikasi perihal RESPECT kepada masyarakat, kurangnya koordinasi struktur RESPECT dengan struktur kepemimpinan lokal terutama di tingkat desa, kurangnya partisipasi masyarakat basis dalam pengambilan keputusan, kurangnya pengembangan program berbasis pada komunitas, minimnya partisipasi perempuan dalam proyek, lemahnya posisi Pemerintah RDTL akibat penguasaan dana oleh UNDP dan lemahnya kebebasan bagi komunitas untuk menentukan prioritas lain karena RESPECT telah menentukan tiga sektor pembangunan sebelum pengimplementasian program.**

## Tantangan Pelaksanaan Program RESPECT

Semua distrik telah melaksanakan program ini. Hingga Juli 2004, semua distrik sudah mendapatkan sertifikat dari RESPECT. Pada 14 September lalu, dana tahap pertama sudah dicairkan ke semua distrik. Koordinator Nasional Unit Training RESPECT menjelaskan bahwa sertifikat yang dibagikan kepada komunitas hanya untuk menunjukkan bahwa proposal dan kegiatan yang diajukan telah disahkan oleh pihak RESPECT, namun tidak disertai penjelasan tentang jangka waktu pencairan dana dari RESPECT. Dengan demikian banyak masyarakat yang cukup lama menunggu dana dalam ketidakpastian, meskipun mereka telah menerima sertifikat. distrik-distrik seperti Manatuto, Lospalos, dan distrik lain yang harus menunggu pencairan dana selama jangka waktu tertentu.

Dampaknya adalah komunitas kemudian menuduh Pemerintah RDTL yang sengaja menunda pencairan dana dan melakukan korupsi, meskipun pada kenyataannya pihak pemerintah tidak memegang dana. Tuduhan ini terjadi karena pada saat pembagian sertifikat pihak RESPECT dan pejabat kementerian Pemerintah RDTL yang terkait terlibat langsung dalam pembagian sertifikat.

Proses pengimplementasian Program RESPECT sebagai berikut: komunitas akan menyusun proposal. Sub-Regional Office (SRO) yang memiliki garis hubungan dengan UNDP akan membantu komunitas secara teknis untuk menulis proposal. Proposal ini akan diajukan ke tingkat distrik, yaitu ke *District RESPECT Committee (DRC)*. Proposal yang telah diajukan akan dipelajari dan bila proposal itu diterima maka akan dilihat berapa jumlah dana yang akan terpakai selama proyek itu berlangsung. Jika dananya kurang dari atau di bawah \$10.000,00 Dolar Amerika maka akan disahkan langsung oleh DRC. Sementara organisasi-organisasi sosial, seperti gereja dan organisasi non pemerintah lokal terlibat sebagai pengamat dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi, jika proposal yang diajukan di atas \$10.000,00 Dolar Amerika, akan diajukan ke tingkat nasional. Dalam hal ini ke *Local Contract Committee (LCC)* di UNDP melalui *Program Implementation Unit (PIU)* dan *Programme Working Committee (PWC)* yang akan membahas dan kemudian dapat mensahkannya sesuai kriteria yang berlaku.

Jika dilihat pada proposal yang diterima oleh RESPECT, jumlah proposal yang masuk ke DRC untuk tiga belas distrik selama ini adalah 931, dengan total dana yang dibutuhkan adalah \$8.438.273,37 Dolar Amerika. Namun yang disahkan oleh DRC adalah 209 proposal dengan total dana \$1.074.852,00 Dolar Amerika.

Koordinator Unit Pelatihan RESPECT Alexandrino de Araujo, menjelaskan bahwa dalam proses penyeleksi proposal yang masuk, hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah apakah program itu sesuai dengan perencanaan distrik atau tidak, apakah proyek tersebut menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat basis atau tidak, dan apakah proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di tingkat basis atau tidak, serta berapa orang yang dilibatkan dalam proyek yang diajukan. Setelah proposal disahkan oleh DRC, proposal akan diajukan kepada SRO untuk dilakukan revisi terhadap dana yang akan digunakan selama proyek itu diimplementasikan. Sementara untuk proposal setingkat nasional, proposal akan diajukan kepada PWC, kemudian

setelah disahkan, baru diajukan kepada PIU untuk direvisi dananya. Setelah dana direvisi, baru diajukan kepada UNDP untuk memproses pencairan dana. Kemudian UNDP akan memproses pencairan dana kepada Implementator melalui *Distrik Fund Office (DFO)*.

Pada tingkat pengimplementasian dan monitoring, PIU hanya akan mendukung secara teknis dengan mengirim tenaga teknis. Namun aliran dana tidak secara langsung ke setiap distrik karena harus melalui *Sub-Regional Office (SRO)* dimana ada empat SRO yaitu Baucau yang bertanggung jawab terhadap Distrik Baucau, Manatuto, Viqueque dan Lautem. SRO Dili membawahi Aileu, Luquisa, dan Oekusi. SRO Ainaro membawahi Same dan Ainaro. SRO Maliana membawahi Covalima dan Ermera. Sementara fungsi DRC selama proyek berlangsung adalah sebagai fasilitator dengan memfasilitasi hubungan antara komunitas dengan RESPECT (SRO).

## Struktur RESPECT dan Sektor yang Diprioritaskan

Beberapa struktur yang perlu dilihat adalah: *Pertama, Programme Implementation Unit (PIU)*. Struktur ini dijalankan oleh seorang manager program yang berpusat di Dili dan merupakan bagian yang terpisah dari UNDP. Manager ini didukung oleh seorang Deputi Nasional. Keduanya bertanggung jawab dalam kelancaran proses implementasi dan monitoring dari proyek ini. Sementara itu, Deputi Nasional juga membawahi empat Sub-Regional Office (SRO) Masing-masing SRO ini dikepalai oleh seorang program manager dari staf internasional yang berstatus sukarelawan PBB (UNV) dengan didukung oleh tiga atau empat staf nasional yang diharapkan dapat berperan penting dalam pengimplementasian program.

*Kedua, adalah National Programme Steering Committee (PSC)*. Program ini diketuai oleh Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan dan Lingkungan hidup dan anggota-anggotanya adalah Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Menteri Transportasi, Telekomunikasi dan Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Nasional dan Keuangan, Menteri Administrasi Negara, Direktur Urusan Veteran, negara-negara donor dan UNDP. Fungsi dari PSC adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, perkembangan program, dan pernyataan keuangan. PSC juga bisa mengadakan rapat mendadak jika dibutuhkan.

Di bawah PSC ada *Programme Working Committee (PWC)* yang diketuai oleh wakil dari Kementerian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan keanggotaan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kementerian Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum, serta Kementerian Administrasi Negara dan UNDP. PWC mengadakan pertemuan teratur setiap minggu dengan tujuan untuk membahas perkembangan dari kegiatan setiap hari, juga bertindak sebagai *procurement*, mengadakan penyeleksi terhadap proposal-proposal proyek-proyek kecil, menyeleksi staf internasional, melaporkan perkembangan kepada PSC dan menindaklanjuti proposal kepada PSC. PWC tidak memiliki garis hubungan dengan PIU. PIU memiliki garis koordinasi langsung dengan DRC. PWC memperoleh laporan dari DRC. DRC sendiri terdapat di setiap distrik yang bertugas memfasilitasi prosedur operasional proyek dan juga

mengadakan seleksi serta mendiskusikan hal-hal yang setingkat distrik. DRC diketuai oleh District Administrator dengan keanggotaan *Development Officer, Line Ministry Officer, Sub District coordinator* dan lainnya (*lihat skema dan tabel terlampir*).

### Tiga Prioritas dan Petunjuk Teknis dari Pemerintah

Ada tiga sektor yang menjadi prioritas dari program RESPECT, antara lain:

#### 1. Pembangunan pertanian dan konservasi hutan.

Untuk program pengembangan pertanian dan konservasi hutan, diimplementasikan berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah rehabilitasi sistem irigasi, penghijauan, pelatihan manajemen pengairan, pelatihan bagi nelayan, dan lainnya.

#### 2. Rehabilitasi infrastruktur di wilayah pedesaan dan perkotaan

Sektor ini mendapatkan petunjuk teknis dari Kementerian Transportasi Komunikasi dan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini akan mendanai konstruksi yang intensif dan rehabilitasi infrastruktur yang dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah perbaikan jalan di pedesaan, rehabilitasi pasar, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dan rehabilitasi fasilitas air bersih.

#### 3. Pelatihan keahlian dan pengembangan usaha-usaha kecil.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan petunjuk teknis dari Sekretaris Negara Perburuhan dan Solidaritas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat rentan, seperti Ex-Combatentes, kelompok janda, kaum yang tidak memiliki lapangan kerja, dengan tujuan bahwa untuk memberikan kemampuan agar dapat menciptakan usaha-usaha kecil atau lapangan kerja sendiri. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pelatihan membuat mebel, mekanik, elektronik, *plumbing*, konstruksi, produksi fasilitas pertanian, pelatihan dan produksi alat-alat perikanan.

### Masalah-masalah Khusus :

#### A. Kurang Informasi Kepada Komunitas

Ketika *La'o Hamutuk* melakukan wawancara dengan komunitas di beberapa distrik, termasuk para *Chefe do Suco* di Dili, Manatuto dan Aileu, banyak kasus yang menjadi keluhan mereka. Keluhan yang datang adalah kurangnya informasi. Meskipun proyek ini telah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi mereka masih bingung terhadap RESPECT. Ada yang mengaku bahwa pernah mendengar, tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang program ini.

Menurut pihak RESPECT sendiri, mereka menggunakan beberapa cara untuk melakukan sosialisasi tentang program ini. Diantaranya melalui workshop, lokakarya, drama bekerjasama dengan *Bibi Bulak*, tetapi kenyataan bahwa kurangnya informasi memang masih menjadi keluhan di banyak tempat. Menurut beberapa pengelola di tingkat distrik bahwa kurang berjalannya proses informasi salah satu penyebabnya karena dana operasional yang diberikan sebagai dukungan administrasi DRC terbatas, yakni hanya kurang dari US\$ 2000 per-distrik.

#### B. Lemahnya Posisi Pemerintah

Meskipun pemerintah secara teoritis dianggap sebagai mitra kerja, tetapi dari data informasi yang kami kumpulkan, ada indikasi bahwa posisi pemerintah cukup lemah. Sejak pertama, struktur yang ada bukan dirancang oleh pemerintah, tetapi rancangan dari UNDP sendiri. Kemudian rancangan ini diajukan kepada pemerintah dan pemerintah hanya menindaklanjutinya. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa sejak awal diskusi antara UNDP dan Pemerintah tentang Program RESPECT kurang berjalan dengan baik. Benar bahwa dalam hal-hal pengambilan keputusan, pemerintah berada di Komisi PSC yang diketuai oleh Wakil Sekretaris Negara Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Abel Ximenes Larisina. Secara teoritis, komisi ini akan mengesahkan berbagai proposal yang masuk dan mendiskusikan berbagai kebijakan terkait. Tetapi beberapa sumber resmi dari pemerintah sendiri mengakui bahwa keberadaan pemerintah dalam struktur demikian sebenarnya hanya sebagai "label dagang saja". Fungsi pemerintah hanyalah pendamping dan pengawas program, sementara pengambilan kebijakan tetap berada di tangan UNDP, dalam hal ini *Program Implementation Unit (PIU)*.

Menurut *La'o Hamutuk* hal di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya terdapat dua struktur RESPECT, yakni struktur pemerintah sebagai alat kampanye RESPECT dan UNDP sebagai pemegang kendali RESPECT. Diakui oleh pejabat pemerintah sendiri bahwa keterlibatan pemerintah dalam program RESPECT agak dilematis karena pemerintah sendiri telah menyetujui program RESPECT sejak awal dan kini harus menghadapi tantangan bahwa pengimplementasian RESPECT kurang berjalan dengan baik di bawah kendali UNDP. Bagaimanapun, masyarakat lebih mengetahui pemerintah dan dampak negatif dari RESPECT akan ditanggung oleh pemerintah Timor Lorosae. Telah ada indikasi bahwa kesalahan atau kekeliruan akan berakibat pada kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.





Presiden RDTL dan PM RDTL dalam suatu program RESPECT. Sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam program ini?

### C. Struktur kepemimpinan lokal yang tidak dilibatkan.

Beberapa *Chefe de Suco*, koordinator organisasi kepemuda-an, dan organisasi perempuan di distrik-distrik yang kita wawancarai menjelaskan bahwa mereka kurang dilibatkan dalam diskusi atau pertemuan untuk pengam-bilan keputusan sejak dimulainya program RESPECT. Sering-kali mereka hanya dijadikan corong informasi kepada masya-rakat saja. Benar bahwa para *Chefe de Suco* belum diakui oleh Pemerintah RDTL sendiri, namun harus diakui bahwa eksistensi mereka banyak didukung oleh komunitas setempat. Selain itu beberapa *Chefe de Posto* juga mengakui bahwa terkadang mereka dilibatkan dalam pertemuan RESPECT, namun mereka tetap merasa bahwa opini yang dikemukakan kurang diperhitungkan dan juga merasa program RESPECT nampaknya diputuskan oleh mereka yang memegang kendali (*top-down*) saja. Pandangan ini tidak terlepas dari proses RESPECT yang hanya memberikan wewenang sampai pada tingkat distrik saja untuk pengambilan keputusan karena RESPECT membentuk struktur tersendiri.

### D. Definisi *Antigo Combatentes* Belum Jelas

Meskipun secara teoritis “Antigo Combatentes” sering di-sebut sebagai sasaran utama dari proyek ini namun pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan. *Pertama*, karena defi-nisi dan kriteria dari *antigo combatentes* itu sendiri belum jelas. Menurut salah satu sumber terpercaya mengatakan bahwa *antigo combatentes* dalam program RESPECT cenderung berorientasi pada pertimbangan politik saja menurut versi UNDP dan pemerintah dalam hal tertentu. *Kedua*, kurang tersedia informasi. Beberapa anggota ex-Falintil mengaku bahwa mereka kurang mendapatkan informasi mengenai RESPECT. Terkadang mereka pernah mendengar sekilas saja, tetapi tidak dapat membuat proposal karena tidak tahu pasti tentang prinsip dan tujuan RESPECT. Selain itu tidak adanya mekanisme yang baku dalam melibatkan komunitas di tingkat pedesaan sehingga membuat para kepala desa dan komunitas merasa tidak dilibatkan dalam program RESPECT.

### E. Proses Penggunaan Dana Masih Lemah

Jika dilihat pada persoalan dana, masih ada beberapa per-soalan yang sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Di beberapa distrik, seperti Aileu dan Ainaro, dana untuk proposal yang disahkan tidak mencapai \$100.000,00 Dolar Amerika. Padahal dari informasi yang ada, setiap distrik memperoleh jatah \$100.000,00 Dolar Amerika. Total jumlahnya mencapai \$1.300.000,00 Dolar Amerika. Sementara dana yang terpakai adalah \$1.074.852,02 Dolar Amerika. Akibatnya masih terdapat dana sisa, sekitar \$211.147,98 Dolar Amerika. Sementara \$26.000,00 Dolar Amerika digunakan untuk biaya operasional di 13 distrik. Hal ini menjadi persoalan, mengingat ada proposal yang tidak disahkan dengan alasan keterbatasan dana, tetapi di lain sisi terjadi kelebihan (surplus) sekitar \$211.147,98 Dolar Amerika.

### F. Indikasi Nepotisme

Ada juga beberapa sumber yang mengeluh karena adanya unsur nepotisme dalam proses penyeleksian proposal. Artinya para penyeleksi di tingkat distrik seringkali hanya meloloskan proposal-proposal dari relasi para penanggungjawab RESPECT di tingkat distrik, meskipun tindakan demikian bertentangan dengan kriteria penyeleksian yang berlaku. Adanya nepotisme demikian mengakibatkan proyek yang seharusnya ditujukan kepada orang miskin dan kelompok komunitas rentan, pada umumnya hanya jatuh ke tangan orang-orang yang telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, misalnya para pengusaha lokal yang telah memiliki proyek tertentu. Isu nepotisme tersebut diungkapkan oleh beberapa kepala desa dan juga beberapa pemimpin organisasi lokal yang ditemui oleh *La’o Hamutuk* di Distrik Manatuto dan Ermera.

### G. Partisipasi Perempuan

Dari perspektif gender, program RESPECT yang dirancang oleh UNDP ini lemah melibatkan kaum perempuan. Bahkan program ini cenderung memberikan peluang kepada kaum laki-laki saja. Ketidakseimbangan jender ini dapat dilihat dari komposisi kaum perempuan dalam data pelaksanaan proyek. Berdasarkan data yang dihimpun dari tujuh distrik di Timor Lorosae, hanya terdapat sembilan orang perempuan yang proposalnya disahkan oleh pihak RESPECT untuk menjadi pelaksana proyek. Hal ini berarti keterlibatan perempuan sangat terbatas, di mana kenyataan ini bertentangan dengan salah satu sasaran dari program RESPECT sendiri, yakni memprioritaskan program pada kaum janda. Ketika *La’o Hamutuk* mengkonfirmasi persoalan tersebut kepada kaum perempuan di sejumlah desa di distrik Dili, Liquisa, Bobonaro dan Ermera, rata-rata mereka berkomentar, “...dalam program RESPECT kaum perempuan disisihkan, kami tidak diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian program RESPECT tidak akan menjawab kebutuhan kami”.

Berdasarkan informasi yang ada, *La'o Hamutuk* melihat bahwa ketidakseimbangan ini lebih disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam prosesnya. **Pertama**, arus informasi tidak sampai kepada masyarakat basis dan kurang melibatkan kaum perempuan dalam proses diskusi dan informasi. **Kedua**, organisasi-organisasi perempuan kurang dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pengambilan keputusan. Beberapa faktor tersebut mempengaruhi minimnya keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengimplementasian program RESPECT.

### Melihat ke Depan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil informasi yang ada, *La'o Hamutuk* prihatin akan proses yang dilalui RESPECT selama ini. *La'o Hamutuk* tetap berkomitmen untuk melakukan pemantauan terhadap RESPECT dalam program-program selanjutnya. Pada tahap sekarang, beberapa usulan dapat disampaikan sebagai berikut:

\* Perlu sosialisasi terus-menerus dengan meningkatkan komunikasi yang efektif dengan komunitas, misalnya lewat diskusi-diskusi mingguan, melibatkan para pemimpin lokal dan organisasi komunitas dalam proses kampanye, sosialisasi, dan pendampingan yang dimulai dari tingkat pembuatan proposal hingga pengimplementasian program.

\* Pemerintah pusat dalam hal departemen-departemen terkait perlu dilibatkan secara efektif, tidak saja kebijakan secara teoritis tetapi perlu dimulai dari proses pembuatan kebijakan umum, kebijakan pengalokasian dana hingga pendampingan dalam pembuatan prioritas dan pengimplementasian program.

\* *La'o Hamutuk* berpendapat bahwa keterlibatan struktur lokal adalah penting karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan komunitas dan hidup bersama komunitas. Sementara itu seringkali pembentukan struktur baru ketika suatu program akan dijalankan akan membingungkan komunitas dan tidak akan efektif karena pembentukan sebuah struktur baru memerlukan waktu lama untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Berdasarkan pada alasan demikian sebaiknya berupaya untuk lebih memperkuat dan membangun kemampuan struktur kepemimpinan lokal yang telah ada. Selain itu perlu keterlibatan dari masyarakat sipil serta organisasi lokal yang eksis di tingkat sub-distrik dan desa.

\* Menurut *La'o Hamutuk*, jika program ini ditujukan untuk Reintegrasi *Antigo Combatentes*, maka diperlukan suatu definisi dan kriteria yang jelas agar tujuan yang diharapkan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi propaganda semata. Lebih jauh proses sosialisasi yang berkelanjutan adalah penting agar komunitas yang menjadi target dari proyek ini benar-benar berpartisipasi hingga merasakan manfaatnya. *La'o Hamutuk* juga berpikir bahwa sebaiknya pihak RESPECT membuat mekanisme agar komunitas bisa berpartisipasi secara efektif dalam membuat prioritas-prioritas sebelum membuat sebuah proposal. Selanjutnya pihak RESPECT juga melakukan proses pendampingan ketiga komunitas mempersiapkan proposal Selain itu perlu pula mengadakan sosialisasi dan komunikasi yang efektif misalnya dengan melakukan diskusi bersama masyarakat terutama komunitas di tingkat basis/pedesaan tentang RESPECT. Proses diskusi sebaiknya dilakukan sebelum proposal dibuat dan proses pendampingan perlu diteruskan hingga suatu program selesai dijalankan. Pada sisi lain perlu adanya suatu batasan yang jelas tentang *antigos combatentes*, hal ini penting karena merekalah yang menjadi sasaran RESPECT dan juga untuk menghindari timbulnya konflik sosial antar anggota masyarakat yang merasa dirinya *antigos combatentes*.

\* *La'o Hamutuk* berpendapat bahwa pandangan dari komunitas akan adanya isu nepotisme disebabkan karena kurangnya transparansi dalam proses penyeleksian proposal. Pada saat yang sama kurangnya pertanggungjawaban hasil proses seleksi dari pengelola RESPECT kepada komunitas. *La'o Hamutuk* juga khawatir bahwa keluhan akan adanya nepotisme juga bisa terjadi karena masyarakat kurang mengetahui secara jelas proses berjalannya RESPECT yang bisa saja mengakibatkan kesalahpahaman antara komunitas dan pihak DRC.

\* Pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan program, pengambilan kebijakan dan pengimplementasian program. Diharapkan proposal dari kaum perempuan khususnya para janda diterima minimal 50 persen, mengingat banyaknya kaum janda akibat invasi militer Indonesia dan juga mengingat kaum janda sebagai salah satu target dan tujuan RESPECT.

## Siapakah Di La'o Hamutuk?

### Staf La'o Hamutuk:

Ines Martins, Tomas (Ato) Freitas, Cassia Bechara, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Maria Afonso, Joaozito Viana, Guteriano Nicolau, Alex Grainger

**Dewan Penasihat:** Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

**Penerjemah Buletin Edisi ini:** Andrew de Sousa, Xylia Ingham, Selma Hayati, Nino Sari

**Foto Buletin Edisi ini:** Lao Hamutuk (1,14,16), Dokumentasi RESPECT (4,5)

# 1. Struktur Pengimplementasian RESPECT dan Para Mitra

|     | <b>Komposisi</b>   | <b>Fungsi</b>  |
|-----|--|--|
| PSC | <p>Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan dan Lingkungan Hidup (<i>Ketua</i>)<br/>                     Wakil Menteri Pembangunan dan Lingkungan Hidup (<i>Wakil Ketua</i>)<br/>                     Perwakilan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</li> <li>* Menteri Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum</li> <li>* Menteri Perencanaan dan Keuangan</li> <li>* Menteri Administrasi Negara</li> <li>* Direktur untuk urusan Veteran,</li> <li>* Negara-Negara Donor dan UNDP</li> </ul>            | <p>Menentukan isu-isu yang berkaitan dengan: kebijakan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kemajuan program, menentukan program RESPECT</li> <li>*Mengadakan pertemuan <i>ad-hoc</i> jika diperlukan</li> </ul>  |
| PWC | <p>Wakil Menteri Pembangunan dan Lingkungan Hidup (<i>Ketua</i>)<br/>                     Sekretaris Negara untuk Urusan Perburuhan dan Solidaritas (<i>Wakil</i>)<br/>                     Anggota:<br/>                     Sekretariat: Unit Pengimplementasian Program (PIU)<br/>                     Anggota, Perwakilan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</li> <li>* Kementerian Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum</li> <li>* Kementerian Administrasi Negara</li> <li>* UNDP</li> </ul> | <p>Menentukan isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas RESPECT Seperti <i>procurement</i>, seleksi proposal tentang proyek berskala mikro, pengimplementasian proposal, seleksi staf internasional</p> <p>Memantau dan mengarahkan pekerjaan dari PIU dan SRO.<br/>                     Menyediakan laporan kemajuan kepada PSC<br/>                     Meneruskan kebijakan yang berhubungan dengan proposal kepada PSC</p>   |
|     | <b>Komposisi</b>   | <b>Fungsi</b>  |
| DRC | <p>Bupati (<i>Ketua</i>)<br/>                     Anggota:<br/>                     Wakil Bupati<br/>                     Perwakilan dari Departemen terkait di distrik<br/>                     Camat<br/>                     RESPECT/UNDP</p>   | <p>Memfasilitasi penyebarluasan konsep dan prosedur operasional proyek kepada komunitas, menentukan isu-isu yang berkaitan dengan proposal tentang proyek berskala mikro, memformulasikan proyek berskala mikro, seleksi mitra pelaksana, serta pengimplementasian proyek.<br/>                     Melakukan seleksi dan menentukan proposal yang bernilai dibawah US\$ 10000 dan meneruskannya ke PWC kalau nilainya di atas US\$ 10000, menyediakan laporan kemajuan kepada PWC</p> |
| PIU | <p>Satu Program Manajer (Internasional) dan satu wakil Program Manajer (nasional).<br/>                     Keduanya berkedudukan di Dili untuk mengarahkan RESPECT.</p>   | <p>Manager Program dan Wakil Manager Program bersama-sama memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan proyek tersebut secara efektif dan efisien. Juga bertanggungjawab atas pencairan dana, pembayaran, dll.</p>  |
| SRO | <p>Ada empat SRO Kantor Sub-Regional): Ainaro, Baucau, Dili dan Maliana, setiap SRO dikepalai oleh seorang Manager Program Distrik (internasional, Sukarelawan PBB).</p> <p>Setiap SRO bekerja sama dengan orang sekitar 3-4 petugas lapangan nasional, yang dewasa ini disiapkan untuk menerima lebih banyak tanggungjawab. Manager Program Distrik bertindak lebih sebagai pendamping ,sementara para petugas nasional memegang peranan kunci di dalam pelaksanaan proyek .</p>  | <p>Memberikan bantuan teknis untuk memperkuat proposal;<br/>                     Bekerja sama dengan DRC untuk menyusun laporan perkembangan;<br/>                     Bekerja sama dengan DRC untuk memantau, menilai implementasi dan manajemen Proyek;<br/>                     Membantu masyarakat dengan menyediakan bantuan teknis dalam rangka pelaksanaan proyek;</p>  |

## 2. Sektor yang diprioritaskan

| Sektor   | Kegiatan   | Hasil  |
|--|--|--|
| <b>Pembangunan Pertanian dan Penghijauan</b>                           | Rehabilitasi Sistem Irigasi,<br>Pembangunan sumur<br>Pembangunan/perbaikan jalan raya<br>Pembibitan<br>Penghijauan<br>Pernakan dan pelatihan kepada petugas<br>Pelatihan penatagunaan tanah<br>Pelatihan penatagunaan air bersih<br>Pelatihan di bidang perikanan  | Komponen ini akan memberikan lapangan kerja berjangka pendek dan peluang meningkatkan pendapatan dalam jangka waktu menengah dan panjang bagi komunitas-komunitas rentan .   |
| <b>Rehabilitasi Infrastruktur di Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan</b> | Perluasan/perbaikan jalan raya di perkotaan<br>Pembangunan/rehabilitasi pasar<br>Rekonstruksi/rehabilitasi sekolah<br>Pembangunan/rehabilitasi fasilitas sarana kesehatan<br>Pembangunan sistem penyediaan air bersih komunitas<br>Pembangunan saluran air/selokan<br>Pembangunan balai-balai pertemuan komunitas<br>Dibangunnya tempat-tempat rekreasi<br>Membersihkan saluran air sungai<br>Daur ulang dan pemindahan sampah | Komponen ini akan memberikan insentif kepada para pekerja bangunan dan rehabilitasi prasarana masyarakat dan sarana lainnya di dalam masyarakat perkotaan dan pedesaan yang menyediakan peluang tingkat hidup yang maju & yang lebih berkelanjutan   |
| <b>Pelatihan Kejuruan dan Pembangunan Bidang Usaha Kecil</b>           | Melakukan survei pasar masyarakat dan peluangnya ;<br>Pelatihan di bidang pertukangan, besi, mekanika, listrik, pelatihan di bidang pemasangan pipa, bidang pekerjaan umum, produksi materi-materi pembangunan, dll  | Akan memberikan peluang kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di dalam masyarakat, termasuk bekas pejuang, janda, kaum muda pengangguran dan yatim piatu untuk memperoleh pelatihan kejuruan dasar atau untuk meningkatkan kemampuan yang telah ada sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga yang trampil. |

## 3. Daftar Dana Per-distrik

| 3. Daftar Dana Per-distrik |                 |                            | Penjelasan Proyek                 | Total Dana (Dolar Amerika) | Kementerian yang Bertanggung Jawab                     |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Distrik                    | Jumlah Proposal | Total Dana (Dolar Amerika) | Pelatihan Keahlian Dom Bosco      | 24.775,00                  | Sekretariat Negara Perburuhan dan Solidaritas          |
| Aileu                      | 11              | 74.452,15                  | OISCA Training                    | 22.504,00                  |  |
| Airaro                     | 14              | 79.115,00                  | SSLS                              | 40.657,00                  |  |
| Baucau                     | 21              | 98.000,00                  | Proyek Taman Perdamaian Tasi Tolu | 32.896,00                  | Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan          |
| Bobararo                   | 15              | 89.840,00                  | Jembatan Lugassa                  | 66.000,00                  | Departemen Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum |
| Covalima                   | 10              | 57.127,62                  | Seical Up                         | 65.000,00                  | Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan          |
| Dili                       | 15              | 98.000,00                  | Proyek Irigasi Maliana II         | 87.00000                   | Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan          |
| Ermera                     | 7               | 30.219,55                  | <b>Total Dana</b>                 | <b>338.832,00</b>          |  |
| Lautem                     | 18              | 98.000,00                  |                                   |                            |  |
| Liquica                    | 27              | 98.000,00                  |                                   |                            |  |
| Maratuto                   | 15              | 98.000,00                  |                                   |                            |  |
| Manufahi                   | 16              | 85.646,00                  |                                   |                            |  |
| Oe-Cusse                   | 21              | 98.000,00                  |                                   |                            |  |
| Viqueque                   | 19              | 98.000,00                  |                                   |                            |  |
| <b>Total</b>               | <b>209</b>      | <b>1,074,852.02</b>        |                                   |                            |  |



# Berita Singkat...

## Lokakarya Analisa Jender & Peranan Laki-Laki dalam Isu Jender

Selama tahun 2004, Asosiasi Laki-Laki Anti Kekerasan (AMKV) bekerja sama dengan *UN Fund for Population Agency* (UNFPA) telah mengadakan lokakarya dengan topik “Analisa Jender” dan “Peranan Laki-Laki dalam isu Jender” di berbagai desa di delapan distrik di Timor Lorosae. Lokakarya telah dilaksanakan di Distrik Liquisa, Ermera, Aileu, Manatuto, Baucau dan Dili. Sedangkan untuk Distrik Lospalos dan Ainaro dilaksanakan pada bulan Desember ini. Lokakarya bertujuan secara umum untuk meningkatkan kesadaran laki-laki dan perempuan terhadap kesetaraan jender dan secara khusus meningkatkan pemahaman dan keterlibatan kaum laki-laki dalam isu jender sebagai sebuah persoalan sosial di masyarakat. Setiap lokakarya diikuti 35-40 peserta dengan perbandingan 60 persen peserta adalah laki-laki dan 40 persen peserta perempuan.

AMKV sebagai sebuah jaringan kerja yang terbentuk pada tahun 2001 atas inisiatif *La'o Hamutuk* dan beberapa organisasi non pemerintah lainnya. AMKV memiliki komitmen untuk terus menyelenggarakan diskusi dan lokakarya dengan menggunakan metodologi pendidikan populer kepada kelompok sasaran di masyarakat basis di seluruh distrik. Pada tahun ini kegiatan diskusi AMKV didanai oleh UNFPA dengan dibantu *La'o Hamutuk* dalam teknis penyelenggaraan diskusi.\*\*\*

## Aliansi Nasional Untuk Pengadilan Internasional

Pada tanggal 16-22 Oktober 2004, Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional menyebarluaskan informasi terbaru berkaitan dengan tuntutan didirikannya Pengadilan Internasional di Distrik Lautem, masing-masing di Suco Muapitine, Suco Malahara dan Suco Pajahara; dan Distrik Manatuto, masing-masing di Suco Carlilo dan Suco Obrato.

Tim Aliansi ini selengkapnya 10 orang, masing-masing terdiri dari lima mahasiswa, dua pekerja organisasi non pemerintah, dua anggota Forum Rakyat Lospalos dan satu orang dari organisasi keluarga korban. Mereka melakukan pertemuan dengan korban, keluarga korban dan masyarakat setempat untuk mendiskusikan rencana kedatangan tim ahli yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengevaluasi kerja Unit Kejahatan Berat.

Pertemuan di tiga desa di wilayah Lautem dan dua desa di Manatuto tersebut merupakan bagian dari kegiatan kampanye dengan menyebarluaskan informasi mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim ahli tersebut dan meyakinkan masyarakat korban bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan bagi rakyat Timor Lorosae adalah Pengadilan Internasional.\*\*\*

## Konsultasi Publik: Dana Perminyakan

Pada 16 Nopember 2004, Pemerintah menyelenggarakan pertemuan konsultasi publik di Dili untuk mendiskusikan model yang telah diusulkan sebelumnya bagi pembentukan dana dari Industri Minyak bagi Timor Lorosae. Sebelumnya ada beberapa pertemuan yang sama di beberapa distrik.

Pertemuan di Dili meliputi presentasi dari Perdana Menteri, Menteri Perencanaan dan Keuangan dan Direktur Jendral Otoritas Perbankan dan Pembayaran, serta sebuah sesi tanya jawab.

Seperti yang telah dinyatakan oleh *La'o Hamutuk* dengan konsisten, kekayaan minyak dapat dengan mudah menjadi sebuah kutukan daripada sebuah anugerah (lihat Editorial Buletin *La'o Hamutuk*, Vol. 5, No. 3-4). Kondisi ini umum terjadi di hampir semua negara-negara penghasil minyak yang miskin sebelum mereka mulai mengolah minyak dan Timor Lorosae mempunyai kondisi awal yang sama untuk persoalan ini. Meskipun kita mengetahui bahwa manajemen devisa yang baik tidak cukup untuk mencegah “kutukan sumber daya alam”, sebuah Dana Perminyakan dirancang untuk kenyataan dan kebutuhan yang ada di Timor Lorosae yang dapat membantu mengurangi beberapa resiko.

Devisa dari minyak dan gas “bukanlah pendapatan” tetapi sebuah perubahan dari keberadaan bangsa, kekayaan yang tak dapat diperbaharui dari satu bentuk ke bentuk lain, dari minyak ke uang. Karena Timor Lorosae tidak mempunyai sumber daya alam yang banyak yang siap dipasarkan di pasar internasional, minyak dan gas kita mempunyai peran kunci dalam memastikan kemandirian dan daya tahan ekonomi bangsa kita. Timor Lorosae akan mengubah semua minyak dan gasnya menjadi uang dalam dua atau tiga generasi, sebuah proses yang tidak dapat diubah. Isu ini didiskusikan di Konsultasi Publik yang akan sangat menentukan kualitas kehidupan bagi generasi yang akan datang. Jika kita tidak membangun sektor-sektor non minyak dari masyarakat dan ekonomi kita untuk mandiri dalam kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, dan menghasilkan nilai tukar uang asing yang cukup untuk mengimpor apa yang tidak dapat kita produksi, Timor Lorosae akan segera kembali pada statusnya saat ini sebagai negara termiskin di Asia, dengan tingkat penyakit, kurangnya jasa dan tingkat kemiskinan yang tidak dapat diterima.

Oleh karena itu ini merupakan isu yang sangat penting bagi masa depan Timor Lorosae dan hak bagi generasi masa depan masyarakat Timor Lorosae untuk menggunakan kekayaan nasional mereka. Meskipun *La'o Hamutuk* yakin kemauan baik Pemerintah saat mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, tindak lanjutnya hingga sekarang adalah sosialisasi bukan konsultasi. Konsultasi yang sesungguhnya tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Konsultasi meliputi pandangan alternatif, debat, dan isu-isu yang mensyaratkan pencarian tindak lanjut. Sayangnya, dengan susah payah masyarakat umum ditanya pandangan-pandangan mereka mengenai perundang-undangan yang

tertunda pembahasannya, ini bisa menjelaskan mengapa kehadiran masyarakat sipil sangat terbatas, dan mengapa hanya ada beberapa pertanyaan dan menutup pertemuan lebih awal.

Setelah konsultasi publik, Dewan Pengarah Dana Perminyakan menerima proposal dari pihak-pihak lain mengenai model yang diusulkan. *La' o Hamutuk* mengajukan komentar dan usulan dan kami berharap perspektif, pendekatan, dan informasi yang berbeda akan dipertimbangkan dengan serius meski berbeda dengan yang telah diusulkan di dalam bahan diskusi Pemerintah (Usulan dari *La' o Hamutuk* dapat dilihat di situs kami). Kami juga berharap bahwa proses konsultasi terus berlanjut karena perundang-undangan mengenai Dana Perminyakan telah dirancang, ditinjau ulang, dan diundangkan. Kami cukup kecewa untuk mendengar bahwa Dewan Menteri telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Perminyakan pada 9 Desember, dan hasil dari konsultasi publik untuk menunda dulu undang-undang ini belum diumumkan kepada publik. Kami berharap bahwa saat ini Pemerintah akan lebih berusaha membuat konsultasi ini sebuah permulaan yang sungguh-sungguh bagi partisipasi rakyat di Timor Lorosae dan tidak hanya menggunakan partisipasi rakyat bagi lembaga-lembaga internasional.

Poin-Poin Penting yang Diangkat *La' o Hamutuk* dalam Usulannya:

- ★ Perundang-undangan Pemerintah Norwegia mempunyai bagian-bagian yang penting bagi Timor Lorosae untuk mencoba melakukan hal yang sama, tetapi beberapa tidak dimasukkan ke dalam Bahan Diskusi Pemerintah. Sao Tome bisa menjadi sebuah contoh yang lebih sesuai bagi Timor Lorosae.
- ★ Dana Perminyakan harus meliputi semua devisa dari sumber daya alam mineral, tidak hanya devisa dari minyak dan gas di Laut Timor.
- ★ Asumsi-asumsi di dalam Bahan Diskusi mengenai nilai tukar Dolar Amerika dan harga minyak dan gas di masa depan bisa saja salah, dan harus diuji kembali. Dolar Amerika turun nilai tukarnya, dan minyak sebagai sumber daya alam yang terbatas akan lebih bernilai tinggi.
- ★ Perlu menyatukan ketentuan-ketentuan hukum dan sesuai Konstitusi untuk melindungi hak-hak generasi yang akan datang atas warisan nasional, dan untuk memisahkan dengan tegas Dana Perminyakan dengan tekanan yang bersifat politis dan keuangan dari proses membuat anggaran tahunan.
- ★ Sektor-sektor ekonomi lain dan sumber-sumber energi alternatif, perlu untuk dikembangkan sesegera mungkin karena minyak dan gas Timor Lorosae akan habis dalam dua generasi.

- ★ Kami mendukung kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga nilai kekayaan alam kita, meskipun ini harus ditinjau kembali setiap beberapa tahun.
- ★ Kebutuhan merawat perlu dilakukan pada saat menggunakan Dana Perminyakan dalam anggaran tahunan, membedakan antara pengeluaran operasional (pembelanjaan) dan penanaman modal secara fisik dan tenaga manusia (pembayaran modal).
- ★ Parlemen harus diminta untuk mencari sebuah penyelesaian kapanpun ketika uang ditarik dari Dana Perminyakan.
- ★ Dana tidak boleh digunakan untuk jaminan hutang, atau jasa hutang.
- ★ Dana Perminyakan harus diinvestasikan dalam sebuah koleksi keuangan yang berbeda, termasuk keamanan dalam jangka panjang, dengan nilai tukar bukan dalam Dolar Amerika.
- ★ Timor Lorosae harus mengadopsi petunjuk-petunjuk umum atau aturan-aturan etika penanaman modal (pertanggungjawaban secara sosial).
- ★ Dewan Pengarah Penanaman Modal harus mewakili sektor-sektor masyarakat yang berbeda.
- ★ Otoritas Perbankan dan Pembayaran harus bekerja menurut hukum, dengan pejabat Dewan Pengurus yang diangkat menurut hukum.
- ★ Dewan Ahli harus dibentuk, tetapi diperkuat dan diberikan mandat dan kewajiban hukum untuk memperhatikan penggunaan Dana, berkoordinasi dengan Provedor dan Jaksa Agung.
- ★ Semua pembayaran perminyakan harus masuk ke Dana Perminyakan, dengan sanksi-sanksi terhadap para pembayar yang gagal untuk memenuhi, melunasi, dan menegakkan mekanisme pembayaran. Keuntungan dan bunga yang diperoleh dari Dana harus ditabung kembali ke dalam Dana Perminyakan.
- ★ Harus ada praduga yang transparan, yang harus didukung dengan sebuah Register Publik yang mudah diakses dengan syarat-syarat terhadap jenis informasi yang harus terbuka untuk umum. Ini tidak hanya mengenai berapa uang yang ada, tetapi juga dimana uang telah ditabung dan diinvestasikan.
- ★ Proses Konsultasi Publik sejauh ini telah berupa proses sosialisasi daripada sebuah proses konsultasi. Kami menyarankan langkah-langkah khusus untuk membuatnya lebih efektif.
- ★ Rencana perekonomian jangka panjang perlu untuk mempersiapkan Timor Lorosae setelah masa perminyakan berakhir.

**Dengarkan Program Radio "Iguualidade" La' o Hamutuk  
Wawancara dan Komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi  
dan isu-isu lainnya!  
Dalam Bahasa Tetum dan Indonesia  
Setiap Hari Minggu, pukul 1:00 siang di Radio Timor Leste**

# La'o Hamutuk Membutuhkan Anda!

Kami mencari aktivis-aktivis, baik internasional maupun Timor Lorosae untuk bergabung dengan kami.

## Peneliti Nasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Institusi-institusi keuangan internasional

## Peneliti Internasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Sumber Daya Alam

Masing-masing staf di La'o Hamutuk bekerja secara kolaboratif dengan staf lain untuk meneliti dan melaporkan kegiatan institusi-institusi internasional dan pemerintah asing yang beroperasi di Timor Lorosae. Setiap staf berbagi tanggung jawab untuk administrasi dan program kerja, termasuk penerbitan Buletin dan Surat Popular, program radio, pertemuan-pertemuan publik, advokasi, pendidikan populer, koalisi dengan organisasi-organisasi Timor Lorosae lainnya, serta pertukaran kunjungan dengan masyarakat di negara-negara lain. Masing-masing staf bertanggung jawab untuk berkoordinasi paling tidak salah satu dari kegiatan-kegiatan utama *La'o Hamutuk*.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai *La'o Hamutuk*, lihat halaman belakang buletin ini atau website kami di [www.etan.org/lh](http://www.etan.org/lh).

### Syarat-syarat

- Latar Belakang Aktivistis, berpengalaman dan memiliki perspektif
- Punya komitmen untuk menjalankan proses pembangunan di Timor Lorosae lebih demokratis dan transparan
- Punya komitmen untuk saling berbagi pengetahuan dan membantu mengembangkan kemampuan staf-staf yang lain
- Bertanggungjawab, dengan etos bekerja keras dan bersedia bekerja bersama-sama dan kreatif dalam situasi kerja dengan latar belakang budaya yang beragam.
- Memahami dan bersedia untuk bekerja melawan diskriminasi gender
- Punya kemampuan menulis dan komunikasi verbal
- Punya kemampuan untuk menyampaikan informasi faktual dari laporan investigatif
- Sehat secara jasmani dan psikis
- Berpengalaman dalam salah satu bidang yang tertera di atas tersebut
- Pernah bekerja pada perkembangan internasional, penelitian kebijakan dan/atau diharapkan berpengalaman dalam solidaritas internasional

### Syarat-syarat tambahan untuk staf internasional

- Fasih dalam menulis dan berbicara bahasa Inggris (yang diutamakan berbicara Bahasa Inggris sebagai bahasa utama/*native speaker*)
- Berkemampuan di bidang organisasi dan komputer
- Pengetahuan tentang sejarah dan politik Timor Lorosae
- Pernah tinggal dan bekerja di salah satu negara berkembang; dan berhasrat untuk hidup sederhana
- Fasih atau bersedia untuk belajar Bahasa Tetum
- Diharapkan berkemampuan berbahasa Indonesia dan Portugis

### Syarat-syarat tambahan untuk staf Timor Lorosae

- Fasih berbahasa Tetum dan berbahasa Indonesia; serta berkemampuan menulis dan menerjemahkan kedua bahasa tersebut
- Memiliki pengetahuan dasar tentang organisasi dan bersedia untuk menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tersebut
- Sangat diharapkan memiliki pengetahuan tentang investigasi, dengan kemampuan menulis berdasarkan fakta dan jelas
- Sangat diharapkan berkeahlian berbahasa Inggris dan Bahasa Portugis

**Untuk melamar**, tolong sertakan dokumen-dokumen berikut ini ke kantor kami di Farol (Sebelah Perkumpulan HAK dan *Sahe Institute ba Libertasaun*) atau melalui email ke [laohamutuk@easttimor.minihub.org](mailto:laohamutuk@easttimor.minihub.org)

1. Surat lamaran dengan menuliskan alasan-alasan mengapa anda ingin bekerja dengan *La'o Hamutuk*
2. *Curriculum Vitae (CV)*
3. Dua referensi profesional dari organisasi/majikan anda sebelumnya
4. Contoh tulisan mengenai proses pembangunan (satu halaman atau lebih)

**Lamaran anda akan kami pertimbangkan setelah kami terima.**

# Dominasi Pertamina Serta Implikasinya Terhadap EDTL

## Pengantar

Ketika Timor Lorosae diduduki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah Indonesia membangun infrastruktur guna mendukung Rezim Orde Baru, seperti gedung-gedung perkantoran, kantor pelayanan umum dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

Pada tahun 1999, mayoritas rakyat Timor Lorosae memilih untuk merdeka, dan memaksa pemerintah Indonesia keluar dari Timor Lorosae. Secara resmi pemerintah Indonesia telah mengakui Timor Lorosae sebagai sebuah Negara yang merdeka. Kendati demikian, masih ada beberapa masalah antara kedua Negara yang harus diselesaikan diantaranya mengenai asset pemerintah Indonesia di Timor Lorosae, perbatasan dan keamanan, pengungsi, HAM dan lain sebagainya.

Kini setelah empat tahun berjalan, kemajuan pemakaian listrik di Dili sekitar 23,000 keluarga (Households) pengguna jasa pelayanan listrik EDTL, dengan kebutuhan pemakaian sekitar 12 Megawatts (MW). Di luar Dili sekitar 17,000 keluarga pemakai jasa listrik dari 57 generator yang tersebar disetiap Distrik dan sub-distrik. Menurut data dari sebuah sumber mengatakan ditahun 2001 teridentifikasi sekitar 28% dari penduduk atau (sekitar 237,000 orang) mempunyai akses ke pelayanan listrik, dan diperkirakan 36,000 keluarga memiliki akses ke pelayanan listrik di pertengahan tahun 2003.

Dari informasi diatas menunjukkan bahwa kebutuhan pemakaian listrik semakin hari semakin bertambah. Dengan bertambahnya kebutuhan pemakai listrik artinya kebutuhan bahan bakar minyak juga meningkat perkiloliternya.

## Hubungan Pertamina dengan EDTL

Pertamina adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemerintah Indonesia dan adalah salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia.

Sejak awal kehadiran misi UN (UNAMET) di Timor Lorosae Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan minyak yang ada di Timor Lorosae yang dipercaya untuk memasok kebutuhan minyak kepada misi UN tersebut. Misi baru UN di Timor Lorosae (UNTAET) kembali memilih Pertamina untuk memasok kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi UNTAET dan INTERFET. Kerjasama antara misi UN dan Pertamina tersebut berlanjut hingga saat ini. Sejak misi UN berada di Timor Lorosae UN melakukan kontrak jual beli BBM dengan Pertamina.

Pertamina memiliki pembeli utama di Timor Lorosae yaitu misi UN, perusahaan listrik Timor Lorosae (EDTL) dan masyarakat umum. BBM yang disuplai oleh Pertamina adalah Premium, Solar, Minyak Tanah dan Avtur. Untuk keperluan UN, Pertamina memasok BBM bagi kebutuhan transportasi milik UN seperti kendaraan motor roda dua dan empat, dan juga pesawat terbang dan helikopter, selain itu Pertamina juga menyediakan bahan bakar Solar untuk generator dan tangki-

tangki milik UN. Pada bulan Januari 2004 sampai dengan sekarang konsumsi BBM oleh UN telah menurun.

**PERTAMINA adalah BUMN yang 100 % milik Pemerintah Indonesia.**

**Pemegang sahamnya adalah PT. PERTAMINA (Persero).**

**Pertamina termasuk perusahaan minyak terbesar didunia (urutan ke-14).**

**Memiliki omset sekitar 25 milyar dollar pertahun, asset di luar rekening sekitar 16 sampai 20 milyar dollar dan tujuh buah kilang minyak (pabrik pengolahan minyak mentah menjadi minyak jadi) di Indonesia.**

Pada awal keterlibatan Pertamina dalam menyuplai minyak di Timor Lorosae, East Timor Transitional Administration (ETTA) di bawah tanggung jawab UNOPS melakukan kontrak dengan Pertamina. Namun setelah kemerdekaan RDTL pada tanggal 20 Mei 2002, pemerintah RDTL tidak membuat kontrak dengan Pertamina. Pemerintah RDTL hanya melakukan pembelian BBM dengan sistem Local Purchase Order (LPO) kepada Pertamina.

Pada mulanya Pertamina memasok minyak ke seluruh pusat tenaga listrik di Timor Lorosae ( Dili dan distrik) sebanyak  $\pm$  2.000 Kilo Liter per bulan, namun sejak bulan November 2003 Pertamina hanya melayani central listrik di Dili saja yaitu di Comoro sebanyak  $\pm$  1.500 KL perbulan, karena pemerintah RDTL dalam hal ini EDTL memutuskan untuk memperoleh pasokan minyak bagi central listrik di distrik-distrik dari pemasok minyak lain yaitu Sun Shine Fuel.

**Sun Shine Fuel adalah sebuah perusahaan bersama (Joint Venture) antara pengusaha local Timor Lorosae, Australia dan Singapore, dimana sahamnya dibagi rata dengan masing-masing porsi 33,3%. Menurut manajer *Sun Shine Fuel* Joao Martins, *Sun Shine Fuel* hanya memasok 500 Kilo Liter BBM ke EDTL hingga sekarang ini. Bahan Bakar yang dipasok oleh Sun Shine pada umumnya diimport dari Singapore dan Australia. Menurut Joao Martins, *Sun Shine Fuel* hanya memasok BBM ke Timor Lorosae dan *Sun Shine Fuel* tidak terlibat pendistribusian ke distrik.**

Menurut Direktur Procurement RDTL *Gregorio da Silva*, antara pemerintah RDTL dan Pertamina tidak ada kontrak yang tetap dan mengikat, hanya sebatas order saja. Jadi, jika pemerintah kemudian memutuskan untuk meminta perusahaan minyak lain untuk memasok minyak kepada central listrik di distrik-distrik adalah hal yang wajar. Hal ini dilakukan untuk menghindari monopoli oleh satu perusahaan.

Masih menurut sumber yang sama bahwa untuk adanya kontrak kerja sama dengan Pertamina, tidak bisa begitu saja dibuat namun harus melalui suatu proses tender terbuka yang diseleksi ketat secara administrasi, teknik dan financial.

Pada tahun 2002, Pemerintah RDTL telah dua kali ( bulan Mei dan bulan Desember) mengadakan tender standar nasional untuk pengadaan minyak bagi EDTL, dimana Pertamina ikut mengambil bagian dalam tender-tender tersebut. Akan tetapi tidak ada hasil konkrit dari pelaksanaan tender tersebut.

Selanjutnya *Gregorio da Silva* mengatakan bahwa tender tersebut terpaksa dibatalkan karena dokumen tender dari perusahaan-perusahaan minyak yang mengikuti tender tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan tender, diantaranya secara teknik dan financial belum memenuhi syarat.

Karena sejak tahun 1999 Pertamina yang memasok kebutuhan minyak ke semua central listrik di Timor Lorosae, maka dengan itu pemerintah RDTL tetap melanjutkan membeli BBM dari Pertamina hingga pertengahan 2004.

Pemerintah RDTL dalam hal ini procurement kembali membuka kesempatan kepada perusahaan minyak lain untuk menyuplai minyak kepada EDTL sambil mencari alternatif untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik, berkualitas dan profesional melalui tender terbuka secara nasional maupun internasional.

Untuk pemasokan minyak ke EDTL Pertamina tidak membayar pajak, karena merupakan ketetapan dari pemerintah RDTL. Ini berlaku bagi semua perusahaan minyak manapun yang memasok kebutuhan minyak bagi EDTL maka akan dibebaskan dari pajak.

Manager Pertamina *Rifky E. Hardijanto* membenarkan bahwa hingga saat ini memang tidak ada kontrak jual beli minyak antara pemerintah RDTL dengan Pertamina. Pihak Pertamina sendiri sebetulnya menginginkan kontrak daripada order, agar ada jaminan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Karena jika hanya membuka LPO saja, tidak ada keharusan dari salah satu pihak untuk menjalankan kewajibannya.

Dengan tidak adanya kontrak yang mengikat maka akan ada kecenderungan untuk mengabaikan permintaan dari salah satu pihak misalkan stok BBM tidak sesuai dengan kebutuhan pemesan bahkan keterlambatan pemasokan.

Menanggapi keterlambatan pemasokan minyak bagi EDTL, *Hardijanto* mengakui bahwa pada bulan September 2003 memang ada hambatan pasokan dengan tanker. Dan meskipun secara formal tidak ada kontrak yang mewajibkan Pertamina harus mengutamakan pelayanannya kepada EDTL, secara riil Pertamina tetap mengutamakan pelayanan kepada EDTL antara lain melalui alternatif dari Depot Atapupu di NTT, Indonesia.

Sekretaris Negara untuk urusan Air dan Listrik RDTL *Igidio de Jesus* mengatakan bahwa padamnya listrik yang seringkali terjadi pada tahun 2000 sampai 2002 bukan hanya karena keterlambatan pemasokan minyak saja, namun juga karena pemasokan minyak tidak sesuai dengan permintaan. Misalkan permintaan dari EDTL 65 ton Kilo Liter minyak, namun Pertamina hanya memberi 50 atau 40 ton sehingga menyebabkan padamnya listrik selama dua atau tiga jam. Sementara masalah padamnya listrik di beberapa distrik,

misalnya di Distrik Baucau disebabkan karena mesin generator sudah tua dan kapasitas mesin tidak memadai.

Pada tgl 27 Pebruari 2004 pemerintah RDTL dalam hal ini procurement melakukan proses tender berstandar internasional untuk pengadaan BBM bagi EDTL. Tender tersebut terbuka umum untuk semua perusahaan minyak baik nasional maupun internasional. Informasi tender ini dipublikasikan di dalam negeri dan keluar negeri. Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti tender tersebut harus menyampaikan permohonan dan profilnya kepada procurement.

Procurement akan melakukan penilaian kepada profil perusahaan, kemudian bagi yang memenuhi kualifikasi dapat melengkapi dokumennya. Bagi perusahaan yang menang tender, akan melayani kebutuhan minyak di 59 central listrik di Dili dan semua distrik, yang akan dikontrak selama 3 sampai 5 tahun.

Bagi perusahaan-perusahaan minyak yang mengikuti tender ini paling tidak mempunyai pengalaman di bidang supply minyak, berpengalaman dalam manajemen, profesional, dan mempunyai perencanaan untuk keamanan, lingkungan hidup dan tak kalah pentingnya adalah kualitas minyaknya terjamin.

*Igidio de Jesus* mengakui bahwa penyebab rusaknya beberapa buah mesin generator di distrik-distrik selain karena sudah tua, juga disebabkan karena kualitas minyak yang tidak terjamin. Sehingga untuk tender ini, setiap perusahaan yang mengikuti tender harus memberikan sample/contoh minyaknya untuk diuji/ditest di laboratorium. Secara teknik EDTL yang akan melakukan pengujian terhadap kualitas minyak. Berhubung EDTL tidak memiliki laboratorium, maka akan dicari alternatif lain misalnya bekerjasama dengan negara tetangga atau partner lain dalam melakukan test terhadap kualitas minyak di laboratorium mereka.

Menanggapi kualitas minyak sebagai salah satu penyebab rusaknya beberapa mesin generator, pihak Pertamina mengatakan bahwa mereka telah dipercaya oleh UN karena kualitas BBM mereka sesuai standar dari American Standard for Testing Material (ASMT) dan American of Petroleum Institute (API).

Untuk kebutuhan konsumsi publik, Pertamina harus membayar pajak kepada pemerintah RDTL yang dikontrol oleh Bea dan Cukai (Border Control). Sehingga harga penjualan minyak kepada publik tergantung kepada jumlah pajak yang dibayarkan.

Sedangkan mengenai naik turunnya harga BBM tergantung pada harga dasar minyak mentah dunia, misalnya dalam beberapa minggu terakhir ini harga minyak mentah mengalami penurunan yaitu \$ 46 /barrel, sebelumnya harga minyak mentah dunia sempat mengalami kenaikan hingga mencapai \$ 55/barrel.

Sementara pengolahan minyak mentah menjadi BBM memerlukan pembiayaan yang sangat besar, sehingga harga BBM sering naik turun tergantung kepada harga minyak mentah dunia. Sedangkan harga minyak di Timor Lorosae selain dipengaruhi oleh tingkat pajak yang ditetapkan oleh pemerintah RDTL seperti Pajak Import, Pajak Cukai, Pajak Pendapatan dan Pajak Penjualan juga berdasarkan pada harga internasional .

Pemerintah RDTL dalam hal ini diwakili oleh pihak procurement mengatakan bahwa harga minyak di Timor Lorosae

sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pajak import tinggi dan pemerintah RDTL tidak memiliki peraturan penetapan harga minyak. Untuk mengatur harga minyak, maka dilakukannya tender dimana setiap perusahaan yang mengikuti proses tender harus menyampaikan formulasi tentang pengaturan harga minyak ataupun bagaimana mengontrol harga minyak.

Sementara itu ada permainan harga minyak oleh perusahaan-perusahaan pemasok minyak yang sangat merealisasikan masyarakat dimana harga BBM sering melonjak.

Selain Pertamina, juga terdapat beberapa perusahaan ataupun kelompok orang yang melakukan bisnis minyak di Timor Lorosae. Kehadiran berbagai perusahaan tersebut ikut menyemarakkan kompetisi penjualan BBM di Timor Lorosae. Minyak yang dijual didatangkan dari Indonesia, Australia dan Singapura dengan harga minyak juga berbeda-beda.

Mengenai harga minyak yang sering naik turun, menurut *Rifky E. Hardijanto* bahwa itu adalah sesuatu yang wajar, karena harga minyak mengikuti harga pasaran internasional. Sementara perbedaan harga minyak yang dijual Pertamina di Indonesia dengan di Timor Lorosae adalah karena misi Pertamina di Timor Lorosae memang berbeda dengan di Indonesia, dimana di Indonesia Pertamina adalah perusahaan minyak satu-satunya yang berkewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat dimana BBM-nya disubsidi oleh Pemerintah Indonesia sehingga harganya murah.

Pada tanggal 20 Februari 2004 Pertamina melalui Program "Kami Peduli" menurunkan harga BBM-nya. Pertamina mengakui bahwa dinamika harga BBM di Timor Lorosae saat ini memang cukup tinggi dan merupakan beban yang berat bagi masyarakat, sehingga diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat Timor Lorosae, Pertamina memutuskan untuk menurunkan harga BBM Premium dan Solar. Melalui penurunan harga BBM tersebut Pertamina mengharapkan bahwa masyarakat Timor Lorosae akan semakin mencintai Pertamina. Di masa yang akan datang Pertamina mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan jaminan mutu kualitas BBM yang sesuai dengan standar dari American Standard for Testing Material (ASMT) dan American of Petroleum Institute (API); dan jaminan kuantitas dimana seluruh *Metering system* yang dimiliki Pertamina di Timor Lorosae sudah melalui Tera/Timbangan secara periodik oleh Badan Meteorologi dan Geofisika dari Kupang-Nusa Tenggara Timur.

## Tabel Penurunan harga BBM

| Produk           | Harga semula         | Harga mulai tgl 20 Pebruari 2003 |
|------------------|----------------------|----------------------------------|
| PREMIUM (Bensin) | 56,30 Cent USD/Liter | 51,90 Cent USD/Liter             |
| SOLAR (DIESEL)   | 52,60 Cent USD/Liter | 48,20 Cent USD/Liter             |

Program tersebut hanya berlaku sebulan saja. Pada bulan-bulan berikutnya, harga BBM kembali disesuaikan dengan harga internasional. Setiap bulan harga BBM selalu berubah. Juga terdapat perbedaan harga penjualan BBM dari Pertamina kepada UN maupun kepada publik. Misalkan harga BBM pada bulan Nopember 2004 ini sebagai berikut :

| Produk        | Harga untuk UN | Harga untuk lokal |
|---------------|----------------|-------------------|
| PREMIUM       | 0,4760         | 0,6080            |
| DIESEL        | 0,4990         | 0,6340            |
| AVTUR         | 0,5530         | 0,6960            |
| KEROSENE      | 0,5490         | 0,6960            |
| PERTAMAX PLUS | 0,5600         | 0,7040            |

Harga penjualan minyak kepada UN sama dengan harga penjualan minyak kepada EDTL. *Sumber: Pertamina*

Menurut pihak Pertamina bahwa perbedaan harga tersebut dikarenakan BBM yang akan dijual kepada UN dan EDTL tidak dikenai pajak, sementara BBM yang akan dijual kepada publik, dikenai pajak.

Pada tanggal 22 Juli 2004 sampai dengan bulan September Pertamina tidak menyuplai minyak kepada Central Listrik di Comoro, karena EDTL menerima bantuan/hibah dari pemerintah Jepang. Bantuan yang diterima berupa dana yang kemudian oleh procurement digunakan untuk membeli minyak dari Sun Shine Fuel.

Ketika La'o Hamutuk mengkonfirmasi kepada perwakilan kedutaan Besar Jepang, pihaknya mengakui bahwa pemerintah Jepang memberikan hibah kepada pemerintah Timor Lorosae, yaitu sebesar US\$2,500,000 Grant yang disebut (Non-Project Type Grant Aid FY2002) dimana bukan hanya dikhususkan untuk pembelian BBM dan Generator yang berkekuatan MAK 4, akan tetapi juga untuk pembelian Aspal dan Semen. Dari dana tersebut diatas, sekitar US\$1,110,000 telah diserahkan kepada Procurement untuk ditenderkan bagi

penyuplai BBM untuk EDTL Dana tersebut hanya untuk kebutuhan pembelian BBM dalam jangka waktu 1 tahun. Pemerintah Jepang sendiri belum tahu persis apakah pemerintah RDTL akan terus meminta grant bagi suplay BBM. Hingga saat ini pemerintah RDTL belum memutuskan apa saja yang akan diminta dari pemerintah Jepang untuk Non Project Type Grant Aid FY2003

Informasi terakhir yang diperoleh La'o Hamutuk, Pertamina



kembali menyuplai minyak kepada central listrik di Comoro berdasarkan LPO dari Procurement yang telah berjalan 2 bulan. Setiap tanggal 1 - 20 Pertamina memasok minyak sebanyak 1000 KL, sementara sisanya 500 KL dibeli dari Sun Shine Fuel.

Selain persoalan harga minyak yang tidak stabil, Pertamina juga mempunyai persoalan dengan Pemerintah Timor Lorosae menyangkut asset Pertamina yang tidak mau membayar pajak sewa tanah yang sekarang ini dihuni oleh Pertamina.

### **Asset Pertamina**

Kehadiran Pertamina di Timor Lorosae pertama kalinya pada tahun 1976, dimana BBM-nya diangkut oleh DFC atau tangki karet. Kemudian pada tahun 1979 Pertamina membangun Depot Dili di pantai kelapa yang memiliki 6 buah tangki minyak yang berkapasitas 250.000 – 1.250.000 liter. Selain Depot dan tangki-tangki minyak, Pertamina juga memiliki tanker (kapal) dan pelabuhan. Saat ini Pertamina di Timor-Lorosae mempekerjakan 5 orang staff dari Indonesia (termasuk Manager Pertamina) dan ± 40 orang staff lokal baik di bagian Administrasi, Keuangan, Teknik, Sekuriti dan Cleaning service.

Setelah referendum tahun 1999 Pertamina masih tetap melakukan penjualan minyak di Timor Lorosae dan hingga saat ini pusat penjualan BBM Pertamina masih tetap berlokasi di pantai kelapa.

Dalam konstitusi RDTL pasal 54 ayat 4 mengatakan bahwa “hanya warga negara nasional yang mempunyai hak milik atas tanah “. Menurut Direktur pertanahan dan harta benda *Pedro de Sousa Xavier* bahwa, pemerintah RDTL tidak mengizinkan Pertamina untuk tinggal di tanah yang saat ini sedang ditempatinya (pantai kelapa). Pertamina dianjurkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Departemen pertanahan dan harta benda telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pertamina untuk keluar dari lokasi tersebut.

Selain itu, Pedro juga meminta agar Pertamina segera membayar biaya sewa tanah kepada pemerintah RDTL semenjak 25 Oktober 1999 sampai dengan saat ini. Mengenai besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Pertamina kepada pemerintah RDTL dihitung berdasarkan luasnya tanah dan investasi yang dilakukan oleh Pertamina.

*Rifky E. Hardijanto* membenarkan bahwa pihak Pertamina telah menerima surat pemberitahuan untuk relokasi dari pemerintah RDTL. Namun Pertamina tidak akan keluar begitu saja, karena sebagai sebuah badan usaha milik Pemerintah Indonesia, masalah Pertamina termasuk dalam agenda pembicaraan bersama antara negara RDTL dan Indonesia. Pada pertemuan terakhir kedua negara ini di Dili, telah dibentuk sebuah Komisi/forum (Technical sub commission for asset) yang akan membicarakan masalah tersebut.

*Rifky E. Hardijanto* juga mengakui bahwa Pertamina belum membayar sewa tanah kepada pemerintah RDTL. Beliau mengatakan bahwa, tidak bijaksana jika pemerintah RDTL meminta Pertamina untuk membayar sewa tanah dan pelabuhan, karena itu adalah asset Pertamina. Selain itu menurut perspektif Pertamina bahwa masalah ini belum ada penyelesaiannya. Pertamina menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada komisi/forum tersebut.

Meskipun belum membayar sewa tanah, pada tahun 2003 lalu Pertamina telah membayar pajak kepada pemerintah RDTL sebesar 2,3 juta dollar US untuk empat kategori yaitu:

pajak import, pajak cukai, pajak penjualan dan pajak penghasilan. Pembayaran pajak tersebut melalui 2 (dua) mekanisme yaitu untuk pajak import, cukai dan penjualan dibayarkan melalui Alfandega/Bea Cukai secara bulanan. Sedangkan untuk pajak pendapatan dan gaji dibayarkan melalui ETRS secara bulanan. Ketika La’o hamutuk mengkonfirmasi kepada departemen perpajakan Timor Lorosae (ETRS), hingga berita ini diturunkan pihak ETRS belum memberikan jawaban tentang seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh Pertamina kepada pemerintah RDTL.

Belum juga selesainya persengketaan masalah asset pemerintah Indonesia di Timor Lorosae, pemerintah Timor Lorosae telah meminta Asian Development Bank (ADB) untuk menulis Master Plan bagi sektor kelistrikan di Timor Lorosae.

### **Power Sector Master Plan**

Sebagai salah satu perencanaan pemerintah dalam mengatasi persoalan listrik dalam jangka menengah, adalah pemerintah Timor Lorosae telah meminta sebuah perusahaan listrik asal Norwegia yang sekarang ini sedang melakukan Feasibility Study tentang kemungkinan pengembangan Hydro Power Ira Lalaro, yang berlokasi di Distrik Lospalos. Diperkirakan Hydro Power Ira Lalaro akan menghasilkan 27 Megawatts tenaga listrik dimana akan menyuplai arus listrik ke seluruh pelosok negeri ini. Menurut document penting Power Sector Master Plan yang mana sekarang menjadi pegangan bagi pemerintah menemukan bahwa ada sekitar tujuh pilihan dalam pengembangan sektor listrik di masa depan. Tujuh pilihan tersebut antara lain:

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Hydro Power), dasar argumentasi mengatakan bahwa Timor Lorosae memiliki banyak pegunungan dan hal itu merupakan sebuah potensi yang besar untuk mengembangkan Hydro Power. Telah teridentifikasi lima tempat yang berpotensi untuk pengembangan Hydro Power yaitu Ira Lalaro, Baucau, Gleno, Belulic dan Laolo. Dari kelima Hydro Power tersebut diperkirakan akan menghasilkan 80 Megawatts tenaga listrik.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Wind Power), menurut penelitian dokument ini mengatakan pengembangan listrik bertenaga angin sangat memungkinkan di Timor Lorosae mengingat pegunungan yang tinggi dan tiupan angin yang sangat keras dibulan April sampai Oktober. Ada beberapa tempat yang telah teridentifikasi sebagai potensi pengembangan Wind Power yaitu Foho Bagarkoholau di Distrik Aileu, diperkirakan akan menghasilkan 10-15 Megawatts tenaga listrik.
- Minyak dan Gas di Lepas Pantai (Offshore Oil dan Gas), pengembangan sektor ini bisa berjalan kalau Pipe Line dari Greater Sunrise ke Timor Lorosae.
- Minyak dan Gas di daratan (Onshore Oil and Gas), telah ditemukannya sekitar 30 ladang gas dan minyak di daratan Timor Lorosae. Sekarang Petro China sebuah perusahaan minyak dan gas dari China sedang melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak lagi ladang gas dan minyak yang kita punyai.
- Potensi Panas Bumi (Geothermal potential), preliminary assessment dari studi ini menyimpulkan bahwa Timor Lorosae memiliki sumber yang cukup besar untuk panas bumi.

- Potensi Panas Matahari (Solar Power Potensial), juga merupakan sebuah potensi bagi pengembangan listrik dengan system Off-Grid. Sekitar tahun 1996-1997 beberapa daerah di pegunungan telah menggunakan tenaga surya sebagai alternatif dan tenaga surya ini dinilai sangat murah jika dibandingkan dengan pengembangan Hydro Power atau yang lainnya.

- Pembakaran Sampah (Biomass reserves), juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghasilkan arus listrik yaitu dengan pembakaran sampah.

Dari ketujuh pilihan di atas pemerintah telah memulai analisa pengembangan Hydro Power Ira Lalaro dengan bantuan dana dari pemerintah Norwegia sebesar 1,346,000 juta dollar Amerika. Meskipun mendapat dukungan dana dari pemerintah Norwegia, dana tersebut tetap tidak mencukupi Study Kelayakan yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 3,649,635 Juta dollar Amerika.

## Kesimpulan

Pertamina adalah satu-satunya Perusahaan minyak yang tetap beroperasi di Timor-Lorosae ketika Timor-Lorosae menghadapi masa krisis, karena para milisi tidak membakar asset Pertamina di daerah Pantai Kelapa.

Kehadiran Pertamina di Timor lorosae untuk berbisnis dinilai mendominasi. Dominasi Pertamina dalam pemasaran BBM di Timor-Lorosae telah menyebabkan ketergantungan harga pasar. Semua harga BBM distandarkan dengan harga yang dikeluarkan oleh Pertamina. Sehingga Pertamina merupakan penentu harga di Timor Lorosae.

Sebetulnya Program “Kami Peduli” yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2004 merupakan strategi dari Pertamina untuk menarik minat konsumen agar tetap membeli BBM dari Pertamina, karena sebetulnya sebagai sebuah Perusahaan Bisnis, Pertamina lebih mengutamakan keuntungan. Contoh lain adalah dimana Pertamina menjual BBM kepada UN lebih murah dibandingkan kepada publik (masyarakat). Meskipun alasan pajak, tapi perbedaan harga yang cukup mencolok tersebut sangat tidak adil karena UN jelas-

jas sangat mampu untuk membayar lebih, dibandingkan masyarakat.

Meskipun dengan dalih untuk membantu masyarakat Timor Lorosae dan menjembatangi hubungan yang baik antara Indonesia dan Timor Lorosae, Seharusnya sebagai sebuah perusahaan internasional yang berbisnis di Timor Lorosae Pertamina harus mematuhi aturan dan hukum negara RDTL. Dalam arti bahwa Pertamina harus patuh terhadap aturan dan keputusan dari pemerintah RDTL, dan tidak mencampuradukkan urusan bisnis dengan urusan politik.

Pemerintah RDTL yang diwakili oleh procurement sangat lamban dalam menentukan kebijakan untuk mengatur tentang harga BBM, sehingga perusahaan minyak menentukan harga BBM sesuai standar mereka. Sementara hingga article ini diturunkan proses Tender Internasional yang dilaksanakan tidak ada kejelasan tentang sejauh mana proses tersebut berjalan. Bahkan menurut sebuah sumber yang dipercaya, bahwa Tender Internasional tersebut juga telah dibatalkan. La’o Hamutuk mencoba untuk menkonfirmasi dengan pihak procurement, akan tetapi penanggungjawab pelaksanaan tender tersebut tidak memberi komentar.

Jika pemerintah RDTL tidak cepat untuk melakukan penetapan harga BBM, maka masyarakat Timor Lorosae lah yang akan merasakan dampaknya, karena para pebisnis minyak di Timor Lorosae akan memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan dari masyarakat kecil.

Selain itu, peranan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI) dalam hal ini cukup menentukan, meskipun Elisabeth Huybens, perwakilan manager Bank Dunia untuk Timor Leste mengatakan bahwa pemerintah RDTL yang meminta Bank Dunia merancang Dokument Tender Internasional tersebut.

Selain kriteria dari tender yang sangat tinggi, rancangan dokument tender tersebut juga tidak menjamin stabilitas harga yang akan dipasarkan di Timor Lorosae.

Jika melihat kembali ketujuh pilihan diatas, kelihatannya pemerintah sangat ingin secepat mungkin membangun Hydro Power Ira Lalaro, namun dana merupakan kendala utama





bagi proyek tersebut dimana diperkirakan akan menghabiskan sekitar 64 Juta Dollar Amerika. Dari mana pemerintah RDTL akan mendapatkan dana sebesar itu?

## Rekomendasi

Berbicara tentang BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Terpenuhinya kebutuhan akan BBM bagi seluruh masyarakat, sangat tergantung kepada kemampuan daya beli masyarakat dengan harga BBM di pasaran. Sementara Permasalahan yang sangat besar bagi masyarakat di Timor Lorosae saat ini adalah ketidakstabilan harga BBM di pasar, karena tidak adanya kontrol harga BBM oleh pemerintah RDTL.

Pemerintah RDTL harus cepat mengatur tentang harga minyak, agar tidak dimanfaatkan oleh para pebisnis-pebisnis dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini.

Untuk menjawab situasi sekarang ini, alternatif yang ada adalah :

Pemerintah RDTL harus mengalokasikan dana subsidi untuk pembelian BBM bagi EDTL, sebab tariff listrik di Timor Lorosae sangatlah mahal dibandingkan diseluruh dunia.

Mari kita lihat sumber budget untuk EDTL dalam table dibawah ini, dimana menunjukan bahwa hanya satu negara donor saja yang membantu dukungan dana untuk tahun anggaran 2003 sampai 2007, yaitu Norwegia dan jika kita melihat pendapatan EDTL sekitar 32 juta lebih besar dibandingkan dengan pengalokasian dana CFET yang hanya 18 Juta lebih. Jika pengalokasian CFET dinaikan katakanlah sekitar 32 Juta maka tarif listrik akan sedikit murah dan hal itu akan membantu masyarakat ekonomi lemah, dimana mereka bisa sedikit mengubah taraf hidup mereka dari hanya makan satu kali sehari bisa menjadi dua kali sehari. Dana subsidi tersebut bisa diambil dari Timor sea Revenue dimana menurut informasi yang Lao Hamutuk terima bahwa dalam tahun 2004 ini dalam Tiga bulan pertama pendapatan bertambah sebesar 35 juta dollar Amerika. Sambil menunggu adanya Petroleum Fund Law, kami pikir tidak begitu berpengaruh terhadap budget tahunan.

Tabel: Sumber Pendapatan dari Program Pengeluaran Sektor Kelistrikan (\$)

| Sumber Pendapatan                         | TA99/00-TA02/03   |              | TA03/04 - TA06/07 |              |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   | Jumlah            | %            | Jumlah            | %            |
| <b>Total Pengeluaran</b>                  | <b>42.093.464</b> | <b>100.0</b> | <b>99.079.000</b> | <b>100.0</b> |
| Sumber Pendapatan Program Donor Disetujui |                   |              |                   |              |
| Jepang                                    | 6.011.335         | 14.3         | -                 | -            |
| TFET                                      | 4.170.000         | 9.9          | -                 | -            |
| Norwegia                                  | 2.160.770         | 5.1          | 1.346.000         | 1.4          |
| Donor Lain                                | 1.318.000         | 3.1          | -                 | -            |
| Subtotal                                  | 13.660.105        | 32.5         | 1.346.000         | 1.4          |
| Pendapatan EDTL                           | 5.126.365         | 12.2         | 32.050.000        | 32.3         |
| Pengalokasian CFET                        | 23.306.994        | 55.4         | 18.669.000        | 18.8         |
| <b>Total Pendapatan yang Tersedia</b>     | <b>42.093.464</b> | <b>100.0</b> | <b>52.065.000</b> | <b>52.5</b>  |

Alternatif lain untuk jangka waktu 5-10 tahun kedepan adalah mempunyai Perusahaan Minyak Nasional Sendiri. Mulai sekarang pemerintah harus memikirkan bagaimana menyimpang dan menyediakan stock BBM bagi kebutuhan di dalam negeri (Domestic Suplay), dimana ada Perusahaan Minyak Nasional (National Oil Company) yang harus mengambil peranannya dalam hal ini. Pengalaman negara-negara lain adalah mereka mempunyai perusahaan nasional minyak (NOC) sendiri seperti Pertamina, Petronas dan lain sebagainya; selain mengelola keperluan dalam negeri, NOC juga bisa terlibat pengekplorasian bersama perusahaan-perusahaan internasional (International Oil Company (IOC).

Hasil eksplorasi minyak dari ladang-ladang minyak di Laut Timor dapat dijual oleh kita sendiri dan sebagian dapat kita simpan sebagai penyediaan kebutuhan dalam negeri. Ini dapat terlaksana jika kita memiliki sebuah perusahaan minyak nasional. Karena hanya perusahaan minyak nasional yang bisa melakukan semua itu mulai dari mengeksplorasi, eksploitasi, mengolah dari minyak mentah hingga menjadi BBM yang siap dipakai, menyediakan kebutuhan konsumsi dalam negeri seperti penyediaan BBM bagi EDTL hingga sampai menjualnya sendiri ke konsumen luar negeri.

Menurut La'o Hamutuk lebih baik memikirkan bagaimana untuk mendirikan sebuah NOC mulai sekarang adalah sebuah opsi yang terbaik dari pada memberikan peluang kepada perusahaan minyak internasional (IOC) agar seenaknya memainkan harga pasar dan seenaknya membatasi stok pengadaan BBM. Untuk informasi dan data analisa secara detail tentang apakah Minyak dan Gas dari Laut Timor bisa menanggung konsumsi dalam negeri (Domestic Suplay) akan kami turunkan dalam edisi bulletin berikutnya.

Mengenai rencana pembangunan proyek Hydro Power Ira Lalaro, kami melihat bahwa itu bukanlah sebuah solusi untuk mengatasi persoalan listrik di Timor Lorosae, selain memakan biaya yang begitu besar juga akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jika kita melihat pengalaman di negara lain yang mana masyarakat sekitar bendungan tersebut mengalami pengalaman pahit, contoh dekat bisa kita lihat di Kedung Ombo di Indonesia. Jadi menurut kami sebaiknya pemerintah harus menganalisa dampak-dampak negatif yang

akan muncul jika proyek tersebut dijalankan, dan juga pemerintah perlu menganalisa kemungkinan lain seperti pengembangan Solar Power atau tenaga surya. Menghitung biaya ongkos pengembangannya serta melihat manfaat yang akan diberikan oleh sistem ini.\*\*\*

## Laporan Dari Konsultasi Opini para Pemimpin IDA 14 Hanoi, Vietnam 9, Juli 2004

**K**e Empat Belas perwakilan dari Negara-negara peminjam dana IDA (International Development Agency) dari kawasan Asia, bertemu di Hanoi, Vietnam, dan berdiskusi serta bertukar pengalaman dengan para donor dan juga perwakilan Negara-negara peminjam lainnya. Pada pertemuan pertama IDA 14 yaitu ada tiga tema sentral yang didiskusikan antara lain: 1) Pengembangan Sektor Swasta, 2) Kemitraan di tingkat Pemerintah, dan 3) Pengembangan Strategis. Yang terwakili dalam Konsultasi Opini para “pemimpin” adalah perwakilan dari Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam dan Timor Lorosae. Dari kesemuanya ada Tujuh orang dari perwakilan LSM, Tiga dari Sektor Swasta dan keempat lainnya adalah pejabat Pemerintah. Maksud dari pertemuan tersebut adalah mendengarkan pendapat dari Negara-negara peminjam dana IDA, tentang bagaimana mereka menggunakan sebaik mungkin uang yang mereka pinjam dari Bank Dunia khususnya dari IDA, dengan kata lain bagaimana agar mereka bisa memperbaiki dan menguatkan Dokumen Strategis Pengurangan Kemiskinan (PRSP) sebaik mungkin. Didalam konsultasi tersebut hanya Timor-Leste satu-satunya Negara yang belum meminjam uang kepada siapa pun termasuk kepada Bank-Dunia. Jika seandainya suatu saat Timor-Leste meminjam uang pada Institusi-Institusi Keuangan Internasional (IFI’s), kemungkinan terbesar adalah meminjam uang pada Bank Dunia melalui IDA, karena di dalam IDA, Timor-Leste dikategorikan sebagai Negara-negara Post-Conflict dan juga sebagai Negara yang pendapatan perkapitanya dibawah US\$400/tahun.

### **Pengembangan Sektor Swasta**

Tema pertama yang didiskusikan adalah bagaimana mengembangkan sektor swasta, dalam tema ini salah satu panelis dari Sri Lanka, Ken Ballendra menyampaikan perspektif sektor swasta di Sri Lanka. Sebagai salah satu pengusaha di Sri Lanka, Ballendra menyampaikan bahwa sektor swasta sangat berperang dalam menentukan roda pembangunan ekonomi di Sri Lanka. Sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan juga merupakan tulang punggung iklim investasi. Ballendra mengusulkan agar pinjaman IDA bukan hanya diberikan kepada pihak pemerintah, namun pihak swasta pun berhak mendapatkannya. Mr. Jannes Hutagalung dari Indonesia selaku Deputy Kementrian untuk Urusan International Economic Cooperation, tidak menyetujui jika pihak swasta diperbolehkan untuk meminjam uang dari IDA maupun dari Institusi Keuangan Internasional lainnya. Alasannya jika pihak swasta mendapat pinjaman dari IDA atau pun institusi keuangan internasional lainnya, pihak swasta nantinya akan mempertanggung jawabkannya kepada siapa? Apakah kepada parlemen? Ataukah rakyat?

Menurut Hutagalung bahwa hanya Pemerintah yang berhak meminjam uang kepada institusi-institusi keuangan internasional termasuk IDA. Dalam hal ini pihak Bank Dunia tidak memberikan pernyataan yang jelas, komentar-komentar yang diutarakan,

mencoba mendorong pemerintah agar lebih terbuka dengan rekan-kerjanya masing-masing dan sebagai partner yang cukup berarti bagi pemerintah, para donor menyarankan agar pemerintah lebih memberikan kesempatan yang luas kepada sektor swasta sebagai partner dalam pembangunan terlebih pembangunan Infrastruktur. Meskipun ada beberapa peserta tidak setuju dengan hal ini, namun mayoritas peserta yang juga adalah mayoritas para donor dari Bank Dunia, setuju bahwa pengembangan sektor swasta haruslah menjadi prioritas utama bagi pemerintah dimana para donor bisa ikut memainkan peranannya.

Dalam tema ini juga sempat mendiskusikan tentang Perusahaan Kecil dan Menengah (SMEs), Negara-negara peminjam dana IDA mempunyai perbedaan persepsi, ada yang menghendaki agar sebaiknya SME mendapat dukungan Pinjaman Lunak, artinya dana pinjaman dari IDA dengan bunga yang rendah dan ada yang menghendaki agar SME menggunakan Bukan- Sumber Pinjaman Lunak atau Bank Lokal dari pada menggunakan Pinjaman Lunak. Merangsang untuk mengalihkan tantangan kepada sektor swasta mungkin bisa mendapat subsidi, akan tetapi kesuksesan pengimplementasian SME harus melihat dan mengkaji kembali dokumen-dokumen program serta project-project.

### **Kemitraan di Tingkat Negara**

Dalam tema ini, perwakilan dari La’o Hamutuk diminta untuk menyampaikan makalah tentang bagaimana donor bisa bekerja lebih efektif dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil di berbagai tingkatan. La’o Hamutuk diminta untuk menyampaikan perspektifnya karena Timor-Leste dinilai sebagai satu-satunya Negara yang kelihatannya memiliki hubungan mesra dengan Negara-negara donor. Dalam perspektif Bank Dunia, Timor-Leste dinilai sebagai salah satu wahana yang perlu dicontohi oleh Negara lain karena dinilai sangat tepat dan efektif sebagai sebuah mekanisme partisipatif untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman antara pemerintah, donor dan masyarakat madani (LSM).

Menurut Lao hamutuk, faktor terpenting untuk sebuah hubungan kerjasama antara donor, pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta adalah menghargai sesama. Menghargai kedaulatan sebuah Negara adalah penghargaan terbesar untuk sebuah bangsa agar bangsa tersebut bisa dengan leluasa memutuskan nasib masa depannya sendiri. Keputusan terakhir untuk segala kebijakan dalam Negara tersebut haruslah ditangan rakyat Negara itu sendiri, bukannya ditangan Negara-negara donor atau pun ditangan institusi internasional.

Untuk mencapai apa yang dimaksud saling menghargai adalah melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan. Namun pada kenyataannya, mendukung partisipasi bukanlah praktek yang dilakukan oleh institusi-institusi keuangan internasional (IFIs). Konsep partisipasi yang dimaksud oleh IFI adalah membatasi keterlibatan rakyat banyak. Realitas tersebut bisa dilihat dari praktek elaborasi Dokument Strategi Pengurangan Kemiskinan di berbagai Negara peminjam uang Bank Dunia, dimana proses konsultasi hanya merupakan gabungan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa tinggi (*highly questionable*), realitas lain juga bisa dilihat di Timor-Leste seperti proses TSP (Program Dukungan Transisi) yang di kelola oleh pemerintah RDTL yang dirancang

oleh Bank Dunia. Metode yang digunakan Bank Dunia untuk mempersiapkan Action Matrix TSP sangat mirip dengan metode yang digunakan untuk mempersiapkan PRSP: dimana pengaruh konsultan asing sangatlah besar peranannya, dan proses konsultasi itu sendiri sangat terbatas pada 2-3 jam pertemuan dengan beberapa NGO saja, dan final dokument harus di setujui lebih dahulu oleh Dewan tertinggi Bank Dunia.

Dalam presentasi La'o Hamutuk juga mengarisbawahi perlunya pemerintah dan masyarakat sipil perlu mendiskusikan bersama mekanisme-mekanisme alternatif menuju partisipatif yang demokratis dan mempromosikan kebenaran, dimana rakyat bisa berpartisipasi langsung, dan tidak diwakili oleh beberapa kelompok atau organisasi saja.

### **Pengembangan Strategies**

Sebagian peserta melihat bahwa komitmen pemerintah untuk menumbuhkan ransangan kebijakan sangatlah penting. Para peserta juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pengurangan kemiskinan. Keuntungan yang didapat dari pertumbuhan ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh orang miskin. Pemerintah harus didorong untuk mengkaji lebih dalam strategi-strategi untuk pertumbuhan yang adil.

Dalam diskusi para peserta mengarisbawahi bahwa Pasar adalah motor penggerak utama untuk memajukan pertumbuhan, namun pembangunan ekspor dan pembukaan pasar bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini dukungan donor sangatlah diharapkan. Meskipun La'o Hamutuk tidak setuju dengan hal ini, namun kebanyakan peserta menyadari bahwa PRSPs dan PRSCs (dukungan kredit pengurangan kemiskinan) telah menginstrumentasikan di dalam rancangan mempromosikan reformasi kebijakan guna memacu pertumbuhan.

Modal pengetahuan juga didiskusikan sebagai kritik didalam kerja pembangunan. Ketersediaan data akan membantu dalam perancangan proyek, implementasi dan pemantauan. Dalam

hal ini donor bisa memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dari menyediakan dukungan analisis.

Para peserta juga memutuskan bahwa pembangunan kemanusiaan sangat penting untuk pertumbuhan, dan membangun manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan adalah proses yang panjang. Asia mempunyai buruh berlimpah-limpah dengan kecenderungan kerja yang keras, dan sebuah hasrat yang kuat untuk pendidikan, modal pembangunan kemanusiaan haruslah sebagai motor penggerak untuk pertumbuhan masyarakat di Asia, yang sama seperti Negara-negara berkembang lainnya.

### **Kesimpulan**

La'o Hamutuk melihat bahwa pertemuan ini bukanlah sebuah wadah yang efektif untuk menerima masukan dari para peserta konferensi, melainkan hanya untuk memperkuat kebijakan politik IDA saja. Para peserta yang hadir tidak mewakili LSM-LSM dari negaranya masing-masing. Konteks para donor yang dimaksud adalah agen-agen World Bank yang bekerja di berbagai negara, jadi La'o Hamutuk tidak menerima ketidakseimbangan para peserta yang kebanyakan dari anggota World Bank. Keempat belas pembicara yang di-undang semestinya setiap negara terwakili dari LSM, Sektor Swasta, dan Pemerintah, agar informasi yang dikemukakan bukan hanya dari satu sumber saja. La'o Hamutuk percaya bahwa jika model konsultasi semacam ini terulang lagi, maka terminology 'pengurangan kemiskinan' akan berubah menjadi 'reproduksi kemiskinan' dan persoalan dinegara dunia ketiga tidak akan pernah terselesaikan. Dan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini dimana membicarakan masa depan orang miskin, sebaiknya melibatkan sindikat-sindikat atau perkumpulan-perkumpulan orang miskin itu sendiri dan lebih bagus lagi pertemuannya jangan diadakan di hotel-hotel mewah seperti Melia Hotel, melainkan di tempat-tempat kumuh dimana orang-orang miskin tersebut tinggal.\*\*\*

## **Editorial : Kenyataan di balik Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA)**

### **dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan** *(sambungan dari halaman belakang)*

memadai, integrasi pasar domestik yang lemah, dan dengan produksi yang berorientasikan pemenuhan kebutuhan yang tinggi, dalam keadaan seperti ini banyak orang miskin dan daerah miskin yang tertinggal dalam proses pertumbuhan..."

Sebagian besar masyarakat Timor Lorosae tinggal di daerah pedesaan yang terlibat dalam sektor perekonomian non-formal. Aktivitas produksi dan ekonomi terpusat pada produksi pertanian yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara ekonomi pedesaan yang non-formal dengan ekonomi masyarakat perkotaan yang formal sangat minim. Timor Lorosae tidak memiliki sektor industri nasional. Sebagian besar infrastruktur masih harus dibangun kembali. Pendapatan tertinggi di antara negara-negara di sekitarnya (dikarenakan ekonomi berdasarkan didolarkan yang didorong oleh IMF pada periode pertama masa rekonstruksi dan inflasi yang disebabkan oleh banyaknya pekerja internasional). Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penanaman

modal asing dan pertumbuhan ekspor yang menyebabkan resiko eksploitasi dan tumbuhnya daerah industri khusus yang bebas pajak dan tidak ada sistem perlindungan bagi tenaga kerja.

Timor Lorosae perlu dan ingin untuk tumbuh, tetapi fokus pertumbuhan itu haruslah pada strategi pertumbuhan yang seimbang, yang menguntungkan seluruh rakyat Timor Lorosae, bukan pada strategi yang hanya memanfaatkan keadaan mereka. Usaha-usaha untuk membangun perdagangan di Timor Lorosae harus dirancang untuk menguntungkan perdagangan nasional, terutama inisiatif-inisiatif masyarakat. Pemerintah Timor Lorosae harus diijinkan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan yang masuk akal dan praktis, serta dapat mengusahakan perpaduan pajak perdagangan dan sistem perpajakan untuk melindungi industri-industri kecil dan lokal. Kebijakan neo-liberal jika diterapkan di Timor Lorosae tidak akan memberikan manfaat bagi negara atau rakyatnya yang miskin.\*\*

**Dapatkan CD-ROM Oilweb versi 2,0 edisi terbaru bulan  
September 2004 di kantor kami Lao Hamutuk**

## Editorial : Kenyataan di balik Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Bank Dunia meminjamkan uang melalui Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association; IDA) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development-IBRD*) mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan dana hibah.” IBRD tetap menjadikan pinjaman sebagai pilihan dari negara-negara yang kaya. Kedengarannya indah sekali bukan? Terlalu indah untuk menjadi kenyataan.

Memang itulah kenyataannya. Negara-negara berkembang memerlukan pinjaman tanpa bunga dan bantuan keuangan lainnya yang tidak tersedia melalui IBRD. Oleh sebab itu mereka membutuhkan sumber keuangan yang baru. “Sunfed” (*Special UN fund for Economic Development*) akan dikendalikan oleh Majelis Umum PBB dengan mayoritas Negara-Negara Dunia Ketiga, dan “Sunfed” dapat memberikan pinjaman berdasarkan kebutuhan pembangunan mereka. Negara-negara Barat yang mengendalikan Bank Dunia tidak menyukai ide ini. Dipimpin oleh Amerika Serikat, mereka mendorong sumber dana baru yang akan tetap menjadi bagian dari Bank Dunia, yaitu IDA. Menurut Eugene R. Black, Presiden Bank Dunia saat itu, “IDA adalah suatu ide untuk menghalangi perlunya *Sunfed*.” IDA dibuat supaya para penyandang dana Bank Dunia utama dapat tetap mengontrol dana yang tersedia untuk negara-negara miskin.

Di tengah-tengah wacana progresif di dalam Bank Dunia, yang penuh dengan “penurunan tingkat kemiskinan”, “pro-orang miskin” dan “kepemilikan negara”, pada prakteknya Bank Dunia tetap mendorong agenda kebijakan neo-liberal yang dianutnya sejak dulu. Kebijakan-kebijakan ini memaksa negara-negara berkembang untuk meliberalisasikan perekonomian negara mereka dan menswastakan infrastruktur dan pelayanan jasa mereka. IDA hanya akan menyuntikkan dana apabila negara peminjamnya menyetujui kebijakan semacam ini. Sebab itu, sejak awal IDA menghalangi alternatif pembangunan dan ide-ide yang tidak sejalan dengan kebijakan Bank Dunia dan IMF.

Dewan Penasihat Bank Dunia harus memeriksa bahwa semua dana dari IDA digunakan dengan cara yang mereka inginkan. Untuk mengakses dana IDA, negara-negara peminjam memerlukan Rencana Strategi Pengentasan Kemiskinan (*Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP*) berupa rancangan anggaran bagaimana uang pinjaman tersebut akan digunakan.

Walaupun Bank Dunia mengatakan bahwa PRSP adalah hasil kebijakan negara peminjam, kenyataannya bukan demikian. Konsultan-konsultan Bank Dunia seringkali terlibat dalam pembuatan PRSP, kalau tidak mereka menuliskannya sendiri. Jika konsultan internasional tidak terlibat dalam penulisannya, pemerintah negara peminjam sudah tahu apa yang diinginkan Bank Dunia. Draft PRSP seringkali hanya tersedia dalam bahasa Inggris, yang menghalangi akses untuk mengetahui isinya. Organisasi masyarakat sipil sering ‘digunakan’ untuk mengesahkan PRSP, bukan sebagai partisipasi yang murni dalam proses sama dengan diterimanya usulan-usulan dari Bank Dunia dengan mudah. Lebih penting lagi, semua PRSP dikaji lagi oleh Dewan Pengurus Bank Dunia dan IMF, yang kemudian mengirimkannya kembali dengan memberikan tanda-tanda yang mereka inginkan untuk diubah. Pemerintah negara peminjam dipaksa untuk menyetujui PRSP yang disesuaikan dengan prioritas Bank Dunia. Ini yang disebut “kepemilikan negara” oleh Bank Dunia.

Walaupun Timor Lorosae belum memiliki PRSP karena Timor Lorosae belum pernah meminjam uang dari Bank Dunia, Program Bantuan Transisi (*Transitional Support Program–TSP*) yang berupa bantuan anggaran dana dari sejumlah donor yang mencapai jumlah kira-kira hingga \$ 30 juta Dolar Amerika pertahun yang

diurus oleh Bank Dunia, semua ini mengikuti proses yang sama. Karena dana IDA termasuk di dalam TSP, maka Dewan Pengurus Bank Dunia perlu memeriksa penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana TSP harus diperiksa oleh Dewan Penasihat Bank Dunia. Pada dasarnya Bank Dunia mengontrol bagaimana dana dari para penyandang dana tersebut digunakan (mari kita ingat-ingat, TSP adalah uang yang disumbangkan kepada rakyat Timor Lorosae).

***Pertanyaan yang penting sekarang adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini membantu negara-negara miskin? Apakah mereka benar-benar mengurangi kemiskinan? Ada cukup banyak contoh bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui kebijakan-kebijakan neo-liberal tidak menyentuh kemiskinan atau gap, tetapi sebaliknya, malah memperdalam jurang pemisah antara yang miskin dan kaya dan seringkali mendorong sektor-sektor tertentu lebih jauh ke kemiskinan.***

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Conference on Trade and Development–UNCTAD*) pada tahun 2004 menyimpulkan dalam “Laporan Negara-Negara Paling Rendah Berkembang”, bahwa liberalisasi perdagangan di negara-negara seperti Timor Lorosae “yang memiliki infrastruktur komunikasi dan transportasi dalam negeri yang tidak

(bersambung ke halaman 19)

### Apakah La’o Hamutuk itu?

*La’o Hamutuk* (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosae yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosae dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La’o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosae harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La’o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosae yang efektif. Selain itu, *La’o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosae. Staf *La’o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosae maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La’o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosae dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

*La’o Hamutuk* mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La’o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

*Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosae serta masyarakat internasional.*